



DOKUMEN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu Meningkatkan produksi tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan; peningkatan ketahanan pangan; meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan pengelolaan kualitas sumber daya pertanian yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis PD Tahun 2016 - 2021.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala PD.

Wonosari, Februari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,


RISMIYADI, SP.M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2016–2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Dari 5 (lima) IKU PD tahun 2021, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 5 (lima) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian IKU PD Dinas Pertanian dan Pangan merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas Pertanian dan Pangan, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2021.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan
2. Peningkatan ketahanan pangan
3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
4. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan.



2. Peningkatan populasi sapi potong, kambing dan ayam buras
3. Pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan
4. Distribusi dan harga bahan pangan.
5. Peningkatan nilai tambah produk pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan.
6. Pencegahan penyakit *zoonosis*
7. Mewujudkan sentra agribisnis komoditas unggulan
8. Tersedianya akses permodalan bagi petani
9. Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha pertanian
10. Pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	4
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021	10
B. Rencana Kinerja 2021	19
C. Perjanjian Kinerja 2021	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	31
C. Laporan Hasil Evaluasi LKJiP 2020	34
D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	35
E. Penghargaan	94
F. Realisasi Anggaran	95
BAB IV : PENUTUP	97

LAMPIRAN – LAMPIRAN :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

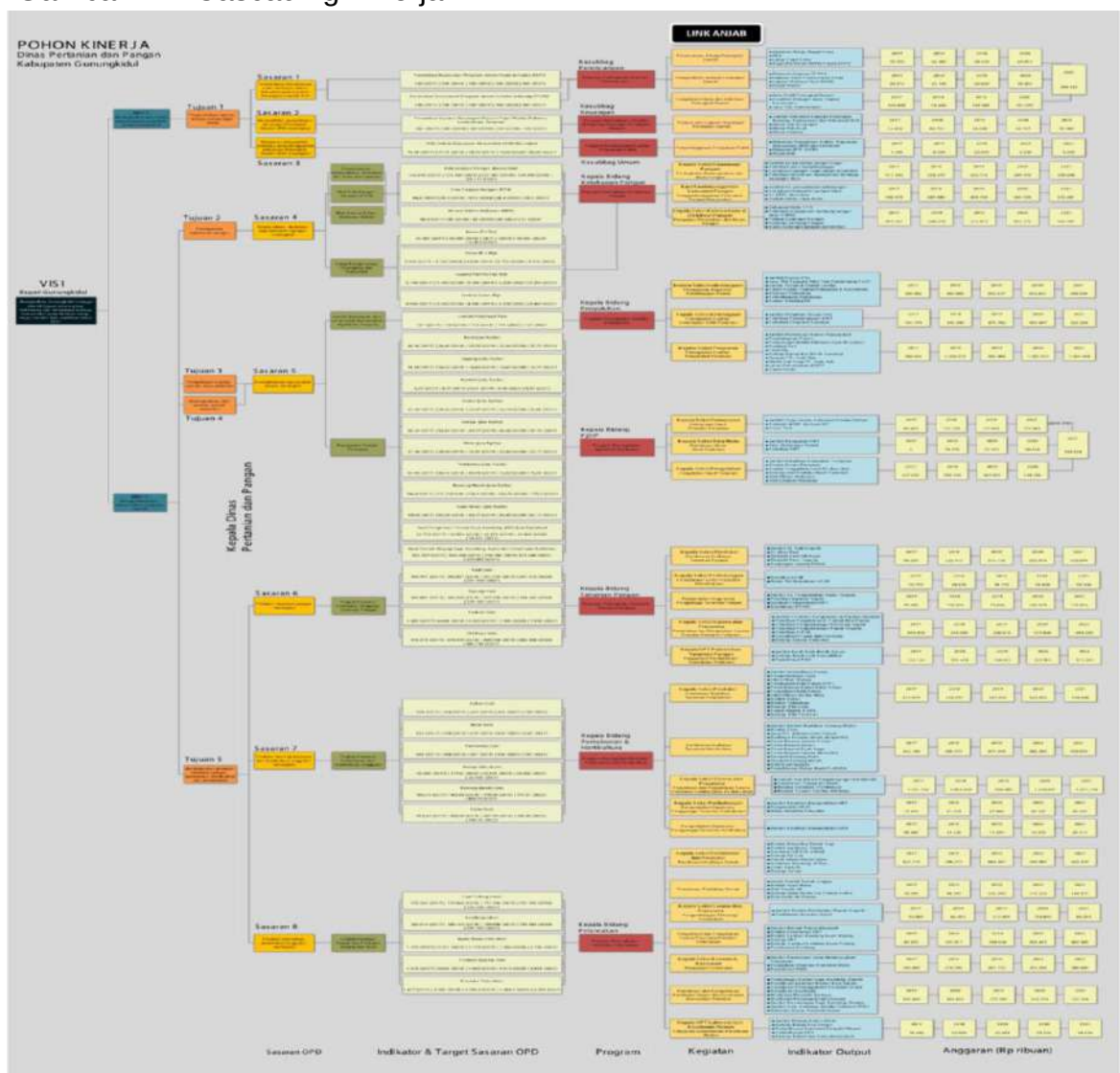
Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2021, maka LKj IP Dinas Pertanian dan Pangan yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2021 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan kepada Bupati Gunungkidul.



1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.1. Cascading Kinerja



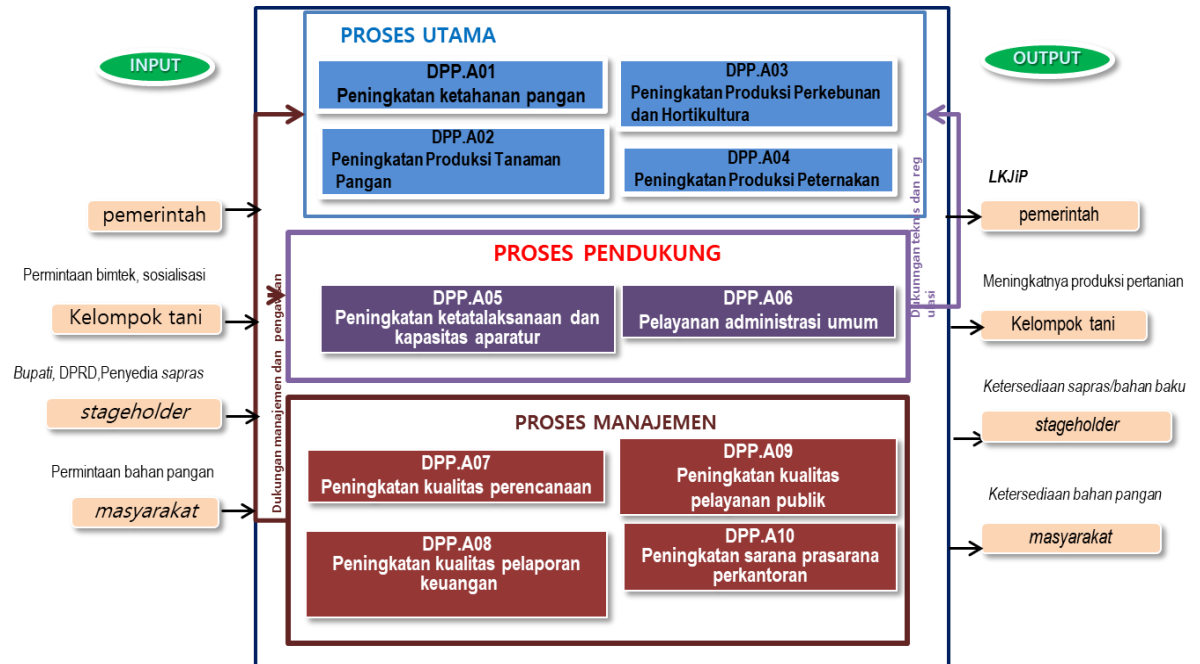


2. Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Hubungan antara mandat kerja dan Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Pangan tersaji dalam pemetaan berikut ini

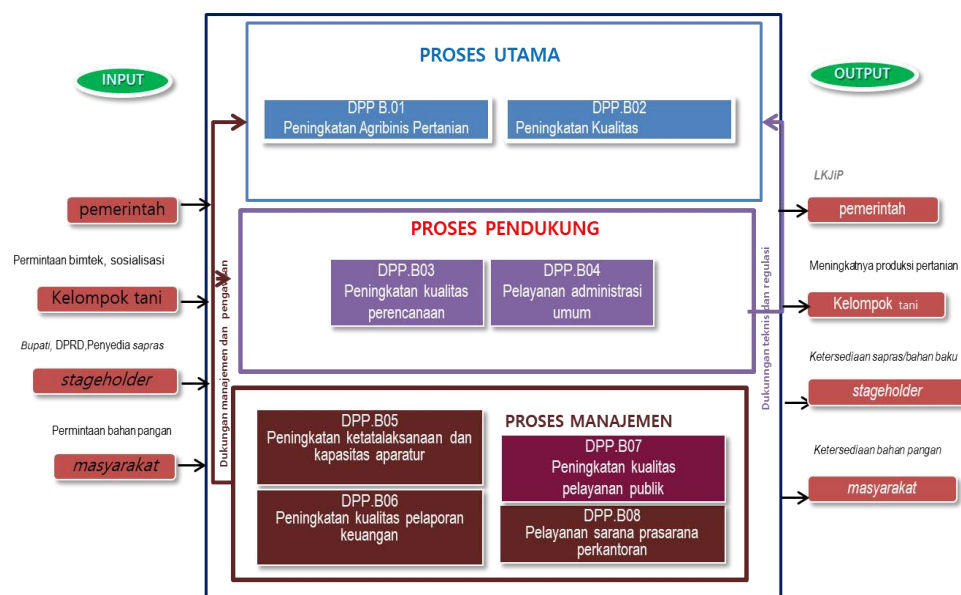
Gambar 1.2

Pemetaan Proses Bisnis Sasaran I : Ketahanan Pangan Meningkatkan



Gambar 1.3

Pemetaan Proses Bisnis Sasaran II : Pendapatan Masyarakat Meningkat





B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanian dan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan pangan

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pertanian dan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- c. penyusunan renja dan perjanjian kinerja di bidang pertanian dan pangan;
- d. pembinaan di bidang pertanian dan pangan
- e. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- f. pembinaan dan fasilitasi pascapanen, pengolahan, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- g. pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- h. pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan pangan;
- i. penataan prasarana pertanian;
- j. pelaksanaan perlindungan tanaman;
- k. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian;
- l. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan;
- n. pengawasan standar mutu alat, mesin, pupuk, dan pestisida pertanian;
- o. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- p. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di ketahanan pangan;
- q. pembinaan peningkatan kualitas SDM di bidang ketahanan pangan;
- r. pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian dan pangan;
- s. pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian dan pangan;
- t. pengembangan kerja sama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan pangan;



- u. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pertanian dan pangan;
- v. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan;
- w. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;

2. Struktur Organisasi

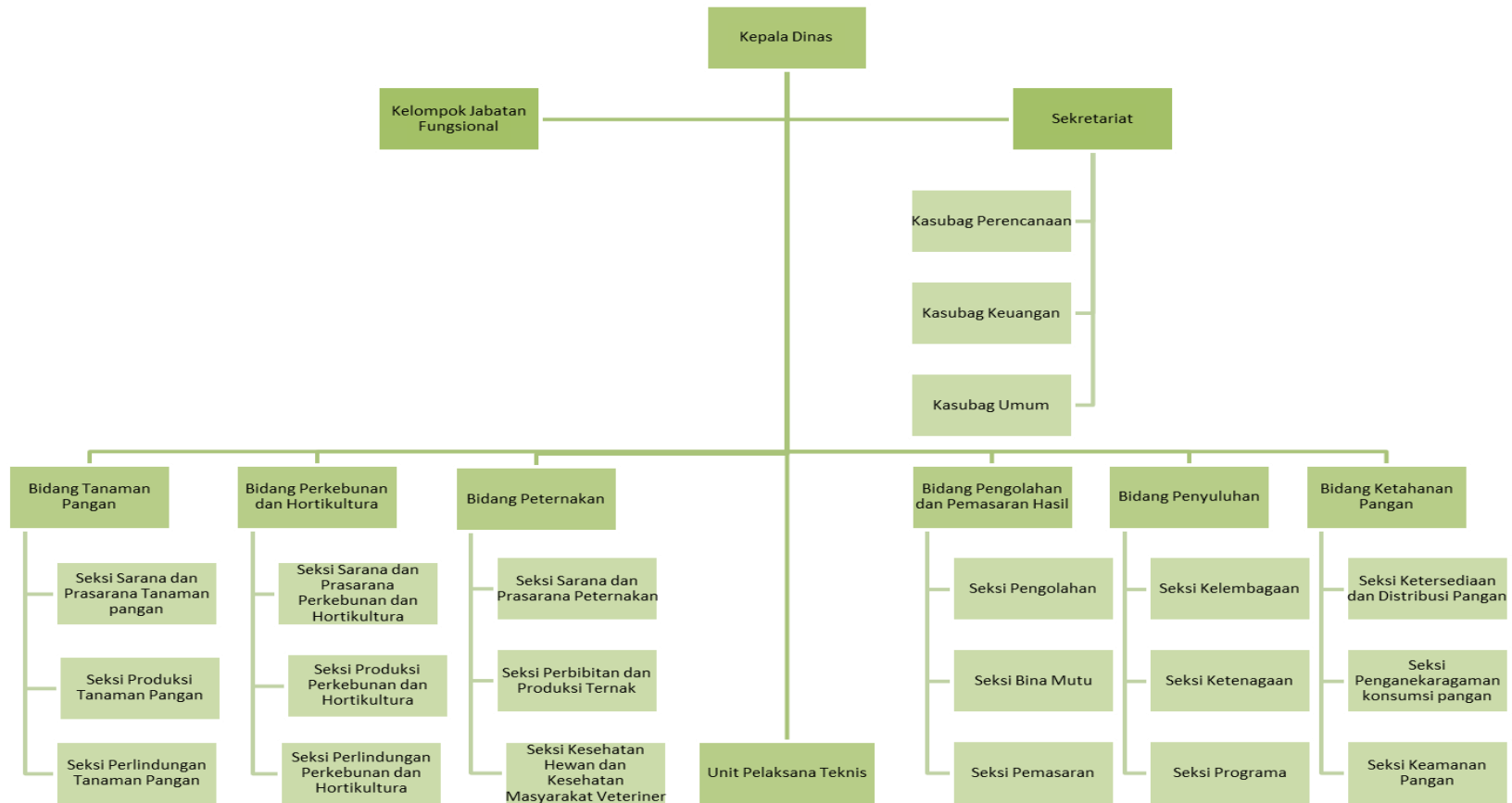
Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari :
 - A. Sub Bagian Umum
 - B. Sub Bagian Keuangan
 - C. Sub Bagian Perencanaan
3. Unsur Pelaksana, yakni:
 - A. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - B. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura;
 - C. Bidang Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 2. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - D. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan;
 2. Seksi Bina Mutu;
 3. Seksi Pemasaran;
 - E. Bidang Penyuluhan
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan;
 3. Seksi Program;
 - F. Bidang Ketahanan Pangan
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan;
 - G. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - H. Kelompok Jabatan fungsional;



Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

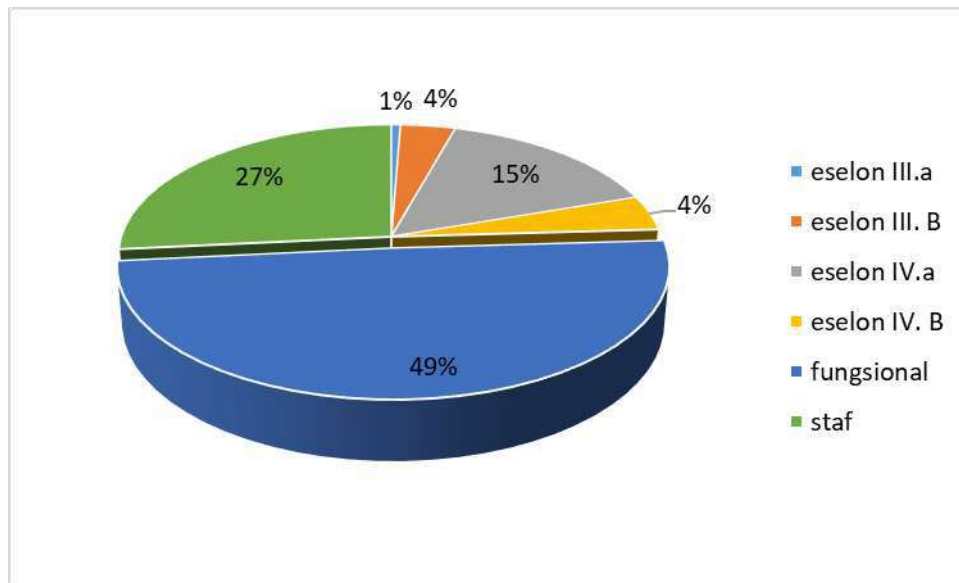




Dukungan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan jumlah pegawai sebanyak 162 orang pada Tahun 2021. Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan sebanyak 39 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 6 jabatan, eselon IV.a = 25 jabatan, dan eselon IV.b = 7 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 123 orang.

Gambar 1.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2021



Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

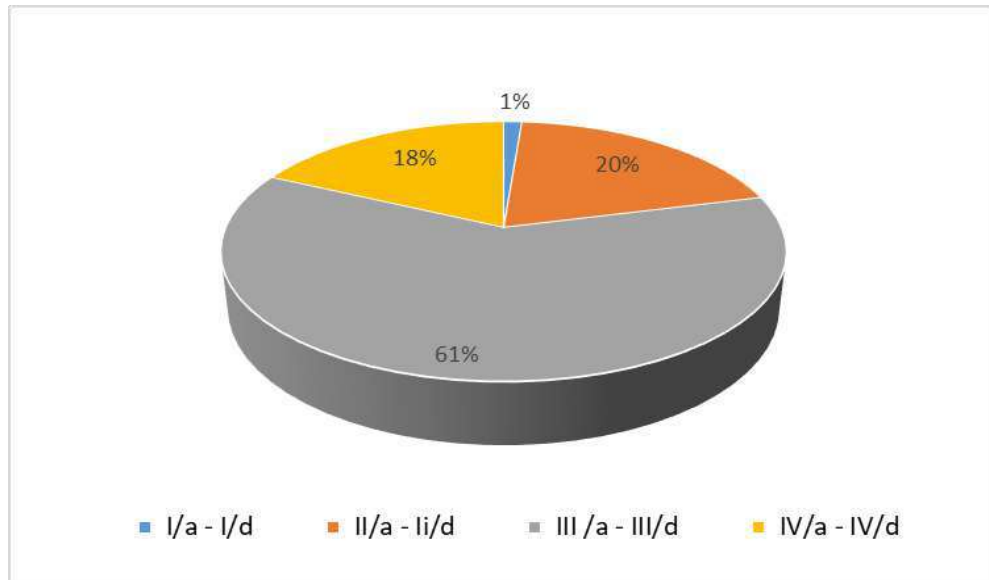
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Tahun 2021
1	I/a – I/d	2
2	II/a – II/d	32
3	III/a – III/d	99
4	IV/a – IV/e	29
	Jumlah	162

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanian dan Pangan, 2021



Gambar 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2021



Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan 2 kewenangan yang dimiliki meliputi urusan ketahanan pangan dan urusan pertanian.

Ketahanan Pangan

- Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
- Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
- Masih adanya desa rawan pangan;
- Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian belum maksimal.



Pertanian

- a. Belum terwujudnya penyaluran dan pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani secara optimal;
- b. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- c. Pengendalian hama penyakit tanaman dan penyakit zoonosis perlu penanganan lebih maksimal;
- d. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
- e. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
- f. Produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan dengan sasaran: Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan dan Tercapainya peningkatan populasi sapi potong, kambing dan ayam buras.
2. Peningkatan ketahanan pangan
dengan sasaran: Terwujudnya pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan dan Distribusi dan harga bahan pangan.
3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian,
dengan sasaran: Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan, Terwujudnya sentra agribisnis komoditas unggulan, dan Tersedianya akses permodalan bagi petani.



4. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian, dengan sasaran: Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha pertanian dan Pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Produksi Tanaman Pangan Meningkat	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan
		Padi
		Jagung
		Kedelai
		Ubi Kayu
2	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:
		Kakao
		Mete
		Tembakau
		Kelapa (butir)
		Bawang Merah
		Cabe
3	Produksi komoditas peternakan unggas meningkat	Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur
		Sapi Potong
		Kambing
		Ayam Buras
		Produksi daging
		Produksi telur
4	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat	Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:
		Ketersediaan pangan (beras)
		Harga pangan yang terjangkau dan terkendali
		Beras IR I
		Beras IR II



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		Jagung Pipil Kering
		Kedelai Lokal
		Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)
		Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)
5	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	Pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)
		Pendapatan sektor pertanian
		padi
		jagung
		kedelai
		kakao
		kelapa
		mete
		tembakau
		bawang merah
		cabe besar
		Hasil pengiriman ternak (sapi, kambing, DOC)
		Hasil ternak daging sapi, kambing, dan ayam
		Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu
6	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
7	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan
8	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD



2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan

VISI “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021.”				
MISI 5 : Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Memperkuat perekonomian berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh	Pendapatan masyarakat meningkat	Peningkatan produktivitas masyarakat	Mengembangkan agribisnis pertanian
		Ketahanan Pangan Meningkat	Penurunan kerawanan pangan, peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan	Memantapkan cadangan pangan, meningkatkan produksi, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan, serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat

3. Indikator kinerja utama

Dinas Pertanian dan Pangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 270/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Produksi Tanaman Pangan Meningkat	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan	(produktivitas dikalikan luas panen) terhadap komoditas unggulan tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu
		Padi	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		Jagung	
		Kedelai	
		Ubi Kayu	
2	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:	(produktivitas dikalikan luas panen) terhadap komoditas unggulan tanaman perkebunan dan hortikultura seperti kakao, mete, tembakau, kelapa, bawang merah dan cabai.
		Kakao	
		Mete	
		Tembakau	
		Kelapa (butir)	
		Bawang Merah	
		Cabe	
3	Produksi komoditas peternakan unggas meningkat	Jumlah Populasi ternak	Hasil Pendataan
		Sapi Potong	
		Kambing	
		Ayam Buras	
		Produksi daging	Rumus Produksi Daging $PD = Ko \times St$ Ko = berat karkas dengan <i>edible offal</i> St = Jumlah pemotongan
		Produksi telur	Rumus Produksi Telur $PT = Po \times p \times \% \text{ Betina produktif}$ P = parameter produksi telur % Betina Produktif = ayam petelur (70%), ayam buras (34,4%), itik (66,45%)
4	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat	Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:	1. Hasil konversi produksi padi ke beras $Rumus = \sum \text{produksi padi} \times 62,7\%$ 2. Ketersediaan pangan beras dengan melihat konsumsi beras



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
			masyarakat berdasar PPH tahun 2016 =81,7 yang diasumsikan turun 3 poit setiap tahunnya dikalikan jumlah penduduk Rumus = ketersediaan beras – (PPH berlaku) x jumlah penduduk
		Ketersediaan pangan (beras)	a) Hasil konversi produksi padi ke beras Rumus = $\sum$ produksi padi x 62,7%
			b) Ketersediaan pangan beras dengan melihat konsumsi beras masyarakat berdasar PPH tahun 2016 =81,7 yang diasumsikan turun 3 poit setiap tahunnya dikalikan jumlah penduduk Rumus = ketersediaan beras – (PPH berlaku) x jumlah penduduk
		Harga pangan yang terjangkau dan terkendali	Harga pangan yang terjangkau terdiri dari IR I, IR II, jagung pipil kering, kedelai lokal
		Beras IR I	
		Beras IR II	
		Jagung Pipil Kering	
		Kedelai Lokal	
		Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	Hasil analisis servey konsumsi pangan
		Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	Hasil analisis servey peredaran pangan
5	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	Pendapatan per kapita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)	Pendapatan sektor pertanian yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, kakao, kelapa, mete, tembakau, bawang merah, cabe besar, pengiriman ternak keluar, hasil ternak (daging sapi, kambing, ayam, dan telur)
		Pendapatan sektor	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		pertanian	
		padi	
		jagung	
		kedelai	
		kakao	
		kelapa	
		mete	
		tembakau	
		bawang merah	
		cabe besar	
		Hasil pengiriman ternak (sapi, kambing, DOC)	
		Hasil ternak daging sapi, kambing, dan ayam	
		Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu	Menunjukkan jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu

Berdasarkan IKU Dinas Pertanian dan Pangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 68/KPTS/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan. Selain indikator kinerja program yang memuat penjelasan indikator kinerja utama di atas ditambah dengan indikator kinerja program yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
			Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
			Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25 Tipologi data: Non kumulatif
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	$\frac{\sum \text{laporan keuangan disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan disusun}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
3	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD}}{\sum \text{Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD}}{\sum \text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{realisasi pemenuhan administrasi perkantoran}}{\sum \text{administrasi perkantoran yang dibutuhkan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Persentase pemenuhan	$\sum \text{realisasi pemenuhan}$



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\text{sarana dan prasarana}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang direncanakan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan	$\frac{\sum \text{ASN PD yang taat aturan}}{\sum \text{ASN PD}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif

4. Program-program

Sasaran strategis PD di dukung dengan program prioritas yaitu:

- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



B. RENCANA KINERJA 2021

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Pertanian dan Pangan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Pangan selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2021 merupakan target tahun kelima dari Renstra PD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja 2021

Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya



perjanjian kinerja Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama Tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/3.27.2.09.0.0.0.01.0000/001/2021 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/ A.1/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ 002/ 2021. Uraian target kinerja dijabarkan pada Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 seperti yang tertera ada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Program Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Produksi Tanaman Pangan Meningkat	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan		
		Padi	ton	291.962
		Jagung	ton	209.500
		Kedelai	ton	7.500
		Ubi Kayu	ton	885.110
2	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:		
		Kakao	Kg	520.000
		Mete	Kg	634.600
		Tembakau	Kg	541.950
		Kelapa (butir)	butir	25.158.062
		Bawang Merah	ton	484,78
		Cabe	ton	502,01
3	Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat	Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur		
		Sapi Potong	Ekor	152.526
		Kambing	Ekor	197.557
		Ayam Buras	Ekor	1.196.808
		Produksi daging	Kg	4.618.751
		Produksi telur	Kg	3.385.232
4	Ketersediaan,	Pertumbuhan Ketersediaan,		



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	distribusi, dan konsumsi pangan meningkat	distribusi, dan konsumsi pangan:		
		Ketersediaan pangan (beras)	ton	125.111,00
		Harga pangan yang terjangkau dan terkendali		
		Beras IR I	Rp	10.815
		Beras IR II	Rp	9.810
		Jagung Pipil Kering	Rp	5.250
		Kedelai Lokal	Rp	8.400
		Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	indeks	89,2
		Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	indeks	91
5	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	Pendapatan per kapita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)		
		Pendapatan sektor pertanian	(dalam juta)	
		padi	Rp/ha	20,77
		jagung	Rp/ha	16,75
		kedelai	Rp/ha	8,50
		kakao	Rp/ha	28,08
		kelapa	Rp/ha	36,76
		mete	Rp/ha	23,15
		tembakau	Rp/ha	76,58
		bawang merah	Rp/ha	175,03
		cabe besar	Rp/ha	67,14
		Hasil pengiriman ternak (sapi, kambing, DOC)	Rp/ tahun	34.667
		Hasil ternak/ daging sapi, kambing, ayam dan telur	Rp/ tahun	270.683
		Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu	Kelompok	117
6		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	79,73



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	pelayanan publik meningkat			
7	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	persen	100,00
8	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	persen	100,00

2. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dapat diakses di <https://eplan.gunungkidulkab.go.id/>. Aplikasi ini mengintegrasikan perencanaan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja fisik/keuangan triwulanan dan tahunan untuk RKPD, RPJMD dan IKU dari OPD.

Gambar 2.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi IKU PD per Triwulan									
Evaluasi IKU PD per Triwulan Tahun 2021									
Tahun 2020									
	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Triwulan 1
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat (Pertanian & Pangan)	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)	persen	100	21	29	21	29	20
2	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat (Pertanian dan Pangan)	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	indeks	79	0	0	0	79	0
3	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	2. Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis Terpadu	kelompok	114	0	0	0	114	0
4	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	1. a. pendapatan sektor pertanian	Rp/ha	66060000	10028896	26780157	16714827	12530120	33998112
5	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	1. a. pendapatan sektor pertanian	Rp/ha	22060000	0	0	9502000	12558000	0
6	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	1. a. pendapatan sektor pertanian	Rp/ha	8460000	1457714	1457296	1457000	4087390	2034090
7	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	1. b. Hasil pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC)	Rp/Th	33808000000	1846500000	1279000000	26825000000	3857500000	72278570390
8	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	1. a. pendapatan sektor pertanian	Rp/ha	72930000	0	0	52555000	20775000	0
9	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	1. a. pendapatan sektor pertanian	Rp/ha	28740000	4004000	6688000	10032000	6018000	3011480



3. Anggaran Program/ Kegiatan

Pagu awal Belanja Langsung pada Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 Nomor DPA/ A.1/ 3.27.2.09.0.0.0.01.0000/ 001/ 2021 sebesar Rp40.299.169.552,00 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/ A.1/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ 002/ 2021 menjadi Rp37.214.401.017,00. Uraian anggaran program Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 seperti yang tertera ada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Anggaran Program Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemendirian Pangan	505.605.000,00	DAU/ DAK
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.140.924.500,00	DAU
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.000.000,00	DAU
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	668.700.000,00	DAU
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.482.999.500,00	DAU/DBH-CHT
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.202.765.000,00	DAU/DBH-CHT
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	637.387.000,00	DAU
8.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	41.450.000,00	DAU
9.	Program Penyuluhan Pertanian	3.348.295.000,00	DAU/ DAK



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≥ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\sum \text{indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\sum \text{indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$



Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

No	Program Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Target Triwulan		
			K	RP	K		RP
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			562.105.000,00	I		19.820.000
					II		540.465.000
					III		1.470.000
					IV		350.000
	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan	Ketersediaan Beras (ton) (Pangan Pokok)	124.096	0	I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	125.111	
	Harga pangan yang terjangkau dan terkendali	Beras IR I	10.765	0	I	11.955	
		(Rp)			II	11.620	
					III	11.546	
					IV	10.815	
		Beras IR II	9.751	0	I	10.089	
		(Rp)			II	9.679	
					III	9.508	
					IV	9.810	
		Jagung Pipil Kering	5.200	0	I	5.297	
		(Rp)			II	4.790	
					III	4.639	
					IV	5.250	
		Kedelai Lokal	8.300	0	I	9.117	
		(Rp)			II	9.162	



**Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021**

No	Program Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Target Triwulan		
			K	RP	K		RP
					III	9.035	
					IV	8.400	
		Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	90	0	I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	89,2	
		Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	95	0	I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	91	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1122055500	I		183.837.000
					II		780.093.500
					III		107.832.500
					IV		50.292.500
	Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan	padi (Rp/ha)			I		
					II		
					III		
					IV	20,77	
		jagung (Rp/ha)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	16,75	
		kedelai (Rp/ha)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	8,50	
		kakao (Rp/ha)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	28,08	
		kelapa (Rp/ha)			I	0	



**Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021**

No	Program Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Target Triwulan		
			K	RP	K	RP	
					II	0	
					III	0	
					IV	36,76	
		mete (Rp/ha)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	23,15	
		tembakau (Rp/ha)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	76,58	
		bawang merah (Rp/ha)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	175,03	
		cabe besar			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	67,14	
		pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC) (Rp ekor)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	8.867	
		Hasil ternak /daging sapi, kambing ayam dan telur (Rp kg)			I	0	
					II	0	
					III	0	
					IV	46.125	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan			4.000.000,00	I		2.245.000
					II		445.000
					III		1.035.000
					IV		275.000



**Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021**

No	Program Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Target Triwulan		
			K	RP	K		RP
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan			548.425.000,00	I		207.085.000
					II		236.980.000
					III		93.275.000
					IV		11.085.000
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			4.677.569.250,00	I		122.356.250
					II		4.354.001.000
					III		113.640.750
					IV		87.571.250
	Jumlah produksi tanaman pangan	Jagung (ton)	208.500	0	I	200.000	
					II	9.000	
					III	500	
					IV		
		Kedelai (ton)	7.000	0	I	100	
					II	4.000	
					III	3.100	
					IV	300	
		Padi (ton)	291.572	0	I	241.000	
					II	46.000	
					III	3.000	
					IV	1.962	
		Ubi Kayu	882.908	0	I	0	
		(ton)			II	0	
					III	885.110	
					IV	0	
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			6.900.983.000,00	I		51.775.000
					II		3.408.205.000
					III		3.412.040.000
					IV		28.963.000
	Jumlah produksi hasil perkebunan hortikultura produk unggulan	Bawang Merah (ton)	477,61	0	I	19,00	
					II	218,00	
					III	179,00	



**Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021**

No	Program Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Target Triwulan		
			K	RP	K	RP	
					IV	67,00	
		Cabe (ton)	494,6	0	I	75,30	
					II	140,56	
					III	200,80	
					IV	85,34	
		Kakao (kg)	465.000	0	I	104.000	
					II	119.600	
					III	119.600	
					IV	176.800	
		Kelapa (butir)	23960059	0	I	6.037.935	
					II	6.289.515	
					III	5.534.774	
					IV	7.295.838	
		Mete (kg)	604.380	0	I	0	
					II	0	
					III	222.110	
					IV	412.490	
		Tembakau	516.143	0	I	0	
		(kg)			II	0	
					III	460.657	
					IV	81.293	
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			30.030.000,00	I		18.395.000
					II		1.555.000
					III		5.040.000
					IV		5.040.000
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			493.594.675,00	I		269.864.675
					II		90.505.000
					III		109.705.000
					IV		23.520.000
	Jumlah populasi ternak	Sapi potong (ekor)	154.619	0	I	152.326	
					II	152.356	
					III	152.400	
					IV	152.526	



No	Program Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Target Triwulan		
			K	RP		K	RP
		Kambing (ekor)	199.438	0	I	191.026	
					II	194.910	
					III	195.887	
					IV	197.557	
		Ayam buras (ekor)	1.173.263	0	I	1.099.644	
					II	1.121.637	
					III	1.144.070	
					IV	1.201.273	
		Daging (kg)	4.710.854	0	I	954.284	
					II	1.043.407	
					III	1.643.182	
					IV	977.878	
		Telur (kg)	3.486.002	0	I	829.455	
					II	904.084	
					III	902.513	
					IV	749.180	
9	Peningkatan Kualitas Penyuluhan			514.735.000,00	I		133.685.000
					II		145.590.000
					III		134.800.000
					IV		100.660.000
		Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu	117		I	0	
		(kelompok)			II	0	
					III	0	
					IV	117	

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2021 dengan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya



perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan dapat terwujud.

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021. Pencapaian IKU tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian: Jumlah penduduk di sektor pertanian)						
		Pendapatan sektor pertanian						
		Padi	26,27	20,77	26,34	126,82	20,77	126,82
		Jagung	19,29	16,75	24,62	146,99	16,75	146,99
		Kedelai	8,73	8,5	11,21	131,88	8,5	131,88
		Kakao	15,47	28,08	15,69	55,88	28,08	55,88
		Kelapa	31,5	67,14	23,30	63,38	67,14	63,38
		Mete (biji)	6,72	23,15	4,00	17,28	23,15	17,28
		Tembakau	76,66	76,58	56,72	74,07	76,58	74,07
		Bawang merah	494,35	175,03	147,28	84,15	175,03	84,15
		Cabe besar	59,13	67,14	76,53	113,99	67,14	113,99
		Hasil pengiriman ternak (sapi, kambing, DOC)	231.119,20	34.267	147.954,76	426,79	34.267	426,79
		Hasil ternak /daging sapi, kambing ayam dan telur	287.979,44	270.683	341.227,10	126,06	270.683	126,06
		Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu	114	117	117	100,00	117	100,00
2	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat	Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:						



**Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
		Ketersediaan Pangan (Beras)	126.762	125.111	162.167	129,62	125.111	129,62
		Harga pangan yang terjangkau dan terkendali						
		Beras IR I	12.000	10.815	11.400	105,41	10.815	105,41
		Beras IR II	9.100	9.810	9.259	94,38	9.810	94,38
		Jagung Pipil Kering	5.600	5.250	6.645	126,57	5.250	126,57
		Kedelai Lokal	9.200	8.400	11.941	142,15	8.400	142,15
		3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	87	89,2	88,2	98,88	89,2	98,88
		4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	85	91	84,9	93,30	91	93,30
3	Produksi Tanaman Pangan Meningkat	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan :						
		Padi	289.076	291.962	301.161	103,15	291.962	103,15
		Jagung	275.894	209.500	275.914	131,70	209.500	131,70
		Kedelai	4.753	7.500	4.394	58,59	7.500	58,59
		Ubi Kayu	1.001.629	885.110	829.556	93,72	885.110	93,72
4	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:						
		Kakao	492.433	520.000	555.147	106,76	520.000	106,76
		Mete	939.476	634.600	453.545	71,47	634.600	71,47
		Tembakau	259.469	541.950	169.700	31,31	541.950	31,31
		Kelapa	36.136.603	25.158.062	30.218.226	120,11	25.158.062	120,11
		Bawang Merah	743,23	484,78	1738,11	358,54	484,78	358,54
		Cabe	565,21	502,01	576,34	114,81	502,01	114,81
5	Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat	Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur						
		Sapi Potong	154.423	152.526	161.655	105,99	152.526	105,99
		Kambing	199.147	197.557	206.789	104,67	197.557	104,67
		Ayam Buras	1.128.362	1.196.808	1.109.455	92,70	1.196.808	92,70
		Produksi daging	3.581.061	4.618.751	4.357.430	94,34	4.618.751	94,34
		Produksi telur	3.347.297	3.385.232	3.654.136	107,94	3.385.232	107,94



Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan 34 (tigapuluh empat) indikator kinerja sebagai standar kinerja tahun 2021. Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan menjabarkan ke dalam 10 (sepuluh) program urusan pertanian dan pangan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu:

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.360.903.592
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	562.105.000
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.122.055.500
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.000.000
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan	548.425.000
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.677.569.250
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.900.983.000
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	493.594.675
9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	30.030.000
10. Program Penyuluhan Pertanian	514.735.000
	37.214.401.017

C. Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2020

Berdasarkan hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang menunjukkan kategori peringkat BB (77,21) dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

No	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,24
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,63
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,34
4	Evaluasi Internal	10%	6,92
5	Pencapaian Kinerja	20%	12,08
JUMLAH		100%	77,21

Akuntabilitas Kinerja masih diperlukan perbaikan diantaranya (1) penetapan indikator kinerja sasaran agar mengacu pada tugas dan fungsi, *core business*, serta (2) menggunakan informasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan dan penilaian kinerja. Rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dapat dilihat dalam lampiran laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021.

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2021 dengan kinerja tahun 2020. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2016-2021 serta membandingkan dengan standar provinsi untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar provinsi. Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021. Hasil evaluasi evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:



Sasaran 1

“ Kesejahteraan masyarakat petani meningkat”

Dukungan penguatan cadangan pangan untuk menstabilkan harga pangan demi melindungi pendapatan dan daya beli petani dalam menstimulasi kinerja pertanian jangka pendek pasca Covid-19 adalah jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian lain, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18/2012 tentang Pangan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan hasil panen tidak bisa terserap secara maksimal di pasaran. Hal itu terjadi karena berkurangnya pendapatan masyarakat atau adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi tersebut secara otomatis berdampak pada pendapatan petani. Pandemi ini sedikit banyak merugikan petani baik tanaman perkebunan, maupun hortikultura. Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Pertanian, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul juga menerapkan metode 4 cara bertindak untuk mencapai ketahanan pangan. *Pertama*, peningkatan kapasitas produksi. dengan mengajak pelaku pertanian melaksanakan percepatan tanam padi Musim Tanam II 2020. *Kedua*, diversifikasi pangan lokal. *Ketiga*, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP), kemudian penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten/kota (CBPK). *Keempat*, pengembangan pertanian modern, dan pengembangan korporasi petani.

Sebagai langkah awal Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan beberapa program kegiatan untuk menghadapi pandemi covid-19 ini antara lain melanjutkan padat karya pasca Covid-19, antisipasi bencana/ banjir/ kekeringan, menjaga semangat kerja pertanian melalui bantuan saprodi dan alsintan, mendorong *family farming*, dan memperkuat Kostratani.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berbasis agribisnis. Karena diyakini, dengan orientasi bisnis maka pengembangan usaha bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan menjadi pertimbangan utama. Pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, melainkan sangat terkait dengan pengembangan wilayah, khususnya pedesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian



Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui pendapatan dari sektor pertanian baik hasil produksi tanaman pangan, perkebunan/hortikultura maupun peternakan serta kelembagaan petani.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	pendapatan per kapita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian: Jumlah penduduk di sektor pertanian)								
	Pendapatan sektor pertanian			(dalam juta)					
	Padi	Rp/ha	26,27	20,77	26,34	126,82	Sangat Tinggi	20,77	126,82
	Jagung	Rp/ha	19,29	16,75	24,62	146,99	Sangat Tinggi	16,75	146,99
	Kedelai	Rp/ha	8,73	8,5	11,21	131,88	Sangat Tinggi	8,5	131,88
	Kakao	Rp/ha	15,47	28,08	15,69	55,88	Rendah	28,08	55,88
	Kelapa	Rp/ha	31,5	67,14	23,30	63,38	Rendah	67,14	63,38
	Mete	Rp/ha	6,72	23,15	4,00	17,28	Sangat Rendah	23,15	17,28
	Tembakau	Rp/ha	76,66	76,58	56,72	74,07	Sedang	76,58	74,07
	Bawang merah	Rp/ha	494,35	175,03	147,28	84,15	Tinggi	175,03	84,15
	Cabe besar	Rp/ha	59,13	67,14	76,53	113,99	Sangat Tinggi	67,14	113,99
	Hasil pengiriman ternak (sapi, kambing, DOC)	Rp (ekor)	231.119,20	34.267	147.954,76	426,79	Sangat Tinggi	34.267	426,79



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
	Hasil ternak /daging sapi, kambing ayam dan telur	Rp (kg)	287.979,44	270.683	341.227,10	126,06	Sangat Tinggi	270.683	126,06
2	Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu	Kelompok	114	117	117	100,00	Sangat Tinggi	117	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN						122,27	Sangat Tinggi		122,27

Pada tahun 2021, capaian 12 indikator kinerja pada sasaran pertama sebesar 122,27%. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) target 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021, maka capaian sampai dengan tahun 2020 mencapai 154,61% yang berarti telah di atas target RENSTRA. Capaian indikator pendapatan sektor pertanian yang telah melebihi target RENSTRA adalah komoditi padi (126,48%), jagung (146,99%), kedelai (131,88), cabe besar (113,99%), pengiriman ternak keluar (426,79%), hasil ternak (126,06%) dan Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu. Sedangkan capaian pendapatan sektor pertanian yang telah mendekati target RENSTRA adalah komoditi tembakau (74,07%), dan bawang merah (84,15%). Untuk komoditas kakao (55,88%), kelapa (63,38%) dan mete (17,28%) capaian pendapatan sektor pertanian masih berada dalam kategori tidak berhasil. Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator pendapatan sektor pertanian yang telah melebihi target RENSTRA masuk kategori **sangat tinggi**, untuk capaian pendapatan sektor pertanian yang telah mendekati target RENSTRA masuk dalam kategori **tinggi dan sedang**, sedangkan yang masuk dalam kategori **sangat rendah** adalah capaian pendapatan sektor pertanian yang masih jauh dari target.

Indikator kesejahteraan masyarakat petani meningkat tersebut menunjukkan ada realisasi pendapatan yang naik dan ada yang turun bila dibandingkan tahun 2020. Untuk realisasi pendapatan tahun 2021 yang mengalami peningkatan bila dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2020 terdapat pada indikator : komoditas padi (0,07 juta), jagung (5,33%), kedelai (2,48 juta), cabe besar (17,40 juta), hasil ternak/daging dan telur (53.247,66 juta) dan jumlah kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu (3 kelompok). Sedangkan untuk angka realisasi tahun 2021 dengan realisasi pendapatan menurun bila dibandingkan dengan



capaian tahun 2020 terdapat pada indikator komoditas kelapa (-8,20 juta), tembakau (-19,94 juta), bawang merah (-347,07 juta), dan pengiriman ternak keluar (-83.164,44 juta).

Pendapatan sektor pertanian pada komoditas kelapa, bila dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan (Rp8.200.000,00/ha) dipengaruhi oleh penurunan harga kelapa yang pada tahun 2020 Rp4.617/kg menjadi Rp4.002/kg di tahun 2021. Hasil pantauan dan pendataan harga di tingkat produsen yang diperoleh dengan bertanya langsung (wawancara) pada petani/keompok tani, atau pedagang pengumpul di sentra produksi serta hasil wawancara harga di tingkat konsumen dari pedagang pengecer atau konsumen di Pasar Argosari, Wonosari.

Indikator dari pendapatan sektor pertanian yang memperoleh kategori sangat rendah adalah komoditas mete. Komoditas mete dari target Rp23.150.000,00/ha hanya terealisasi Rp4.000.000,00/ha atau hanya 17,40%. Realisasi bila dibandingkan tahun 2020 meningkat Rp2.180.000,00/ha yang dipengaruhi oleh peningkatan produksi. Dari segi pendapatan, komoditas pertanian memang selalu ditemui bahwa pendapatan yang di peroleh petani selalu berubah-ubah yang di sebabkan oleh berbagai faktor. Harga mete pada tahun 2021 menurun Rp550/kg. Selain itu penyebab penurunan pendapatan mete pada tahun 2021 karena provitas dari tanaman mete juga menurun. Bila di tahun 2020 provitas komoditas mete sebesar 3,56ku/ha ditahun 2021 tercatat provitas komoditas meter sebesar 2,18 atau turun sebesar 1,38ku/ha.

Komoditas tembakau berada dalam kategori sedang pada tahun 2021. Bila dibandingkan hasil tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp19.940.000,00/ha. Dilihat dari harga/kg pada tahun 2021 sebesar Rp61.254/kg menurun sebesar Rp5.956/kg bila dibandingkan tahun 2020 dimana harga tembakau rajang sebesar Rp67.210/kg. Dai segi provitas komoditas tembakau tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 1,19 kh/ha bila dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 10,45ku/ha.

Komoditas bawang merah persentase capaiannya 84,15% yang berarti terjadi penurunan pendapatan dari Rp201.278.576,00 (tahun 2020) menjadi Rp147.280.840,00 (tahun 2021). Penurunan pendapatan dipengaruhi penurunan harga sebesar Rp8.375,00 bila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai harga Rp25.621,00/kg.

Tahun 2021 pendapatan dari pengiriman ternak keluar mengalami penurunan sebesar Rp83.164.444.000,00 bila dibandingkan tahun 2020. Sesuai hasil SKKH, jumlah pengiriman unggas komersil tahun 2021 yang mencapai 17.890.342 ekor, naik 9.738.076 ekor bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 8.152.266 ekor. Untuk pengiriman ternak besar tahun 2021 sebanyak 1.449 ekor menurun 401 ekor bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.850 ekor.



Sedangkan untuk pengiriman ternak kecil (kambing/domba) juga mengalami penurunan sebesar 1.932 ekor di bandingkan tahun 2020 (2.693 ekor) dibandingkan pengiriman ternak kecil tahun 2021 yang hanya sebanyak 761 ekor.

Komoditas padi, pada tahun 2021 dari Indikator kesejahteraan masyarakat petani meningkat juga menunjukkan peningkatan walaupun hanya sedikit Rp70.000,00/ha. Selama tahun 2021 provitas padi sebesar 57,17 ku/ha atau meningkat bila dibandingkan tahun 2020 pada kisaran 52,89 ku/ha. Peningkatan pendapatan juga didukung oleh peningkatan produksi 19,55% bila dibandingkan tahun 2020. Harga komoditas padi selama tahun 2021 juga berada pada rerata Rp5.010,00 lebih tinggi dari harga di tahun 2020 Rp4.966,00

Untuk komoditas seperti bawang merah pendapatan meningkat sebesar Rp371.180.000,00/ha walaupun tingkat produksi menurun tetapi harga jual meningkat sebesar Rp 1.221,00 per kilogramnya menjadikan pendapatan sektor komoditas bawang merah dalam kategori sangat tinggi di tahun 2020. Komoditas cabe persentase capaiannya 89,51% yang berarti terjadi penurunan pendapatan dari 74,38 juta (tahun 2019) menjadi 59,13 juta (tahun 2020). Penurunan pendapatan dipengaruhi penurunan produksi sebesar 71,79 ton bila dibandingkan tahun 2019.

Pendapatan komoditas jagung tahun 2021 juga mengalami peningkatan (Rp5.330.000,00/ha). Dari segi pendapatan komoditas pertanian memang selalu ditemui bahwa pendapatan yang di peroleh petani selalu berubah-ubah yang di sebabkan oleh berbagai faktor. Biaya produksi dan harga jual merupakan bagian dari indikator pendapatan, artinya jika biaya produksi sudah di minimalkan dan harga jualnya baik maka akan berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Tahun 2021 untuk komoditas jagung produksi mengalami peningkatan 0,55% dan harga juga mengalami kenaikan Rp1.189,00 untuk jagung pipil bila dibandingkan tahun 2020.

Komoditas kedelai tahun 2021 ini menunjukkan perolehan pendapatan yang baik pada akhir periode Renstra bila dibandingkan tahun 2020 dengan menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp2.480.000,00/ha. Walaupun produksi di kawasan Kedelai monokultur/ tumpangsari yang banyak ditemui di Kapanewon Semin, Nglipar, Karangmojo, Semanu, Playen dan Wonosari serta wilayah peyangga yang berlokasi di Kapanewon Paliyan, Saptosari, Girisubo, Rongkop, Tanjungsari, Purwosari, Panggang, Tepus, Patuk dan Gedangsari mengalami penurunan -6.94% tetapi karena permintaan akan kedelai tinggi, harga jual di tahun 2021 juga meningkat sebesar Rp2.062,00 bila dibandingkan tahun 2020 (Rp6.978,00).

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang pada tahun 2021 memberikan pendapatan yang meningkat (Rp220.000/ha) bila dibandingkan tahun 2020. Faktor pendukung peningkatan pendapatan dari segi provitas yang paada tahun 2020 sebesar 5,30 ku/ha meningkat menjadi 6,19 ku/ha pada tahun 2021.



Peningkatan provitas ini belum didukung dengan peningkatan harga dimana harga kakao fermentasi di tahun 2020 (Rp29.197,00) lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di tahun 2021 (Rp.25.342) sehingga walaupun meningkat capaian yang diperoleh dari target yang telah ditetapkan masuk dalam kategori rendah (55,88%).

Pendapatan petani dari komoditas cabe besar tahun 2021 dalam kategori sangat tinggi, dan bila dibandingkan tahun 2020 meningkat Rp17.400.000,00/ha. Peningkatan pendapatan juga didukung oleh provitas yang mencapai 34,96 ku/ha atau lebih tinggi 5,86 ku/ha bila dibandingkan tahun 2020 (29,10 ku/ha). Sedangkan peningkatan Rp1.367,00/kg pada harga juga mempengaruhi peningkatan pendapatan pada komoditas kakao di tahun 2021 (Rp21.891,00) bila dibandingkan harga di tahun 2020 (Rp.20.524,00).

Jumlah permintaan akan daging sapi setiap tahun berfluktuasi karena adanya hari-hari besar keagamaan dan adat. Jumlah permintaan meningkat drastis pada hari-hari besar seperti idulfitri, natal, tahun baru, pesta adat dan lain-lain. Menjelang hari-hari besar tersebut, utamanya idul-fitri dan idul-adha, para pedagang ternak sudah mengumpulkan stok sapi dalam jumlah besar. Jumlah pemotongan sapi menjelang hari besar keagamaan meningkat dari hari-hari biasa. Harga daging sapi selalu naik pada hari raya idul-ftri, dan tidak pernah turun setelah itu walaupun permintaan sudah kembali normal. Hasil ternak/daging dari hasil pemotongan ternak sapi, kambing dan ayam pedaging juga mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp53.247.600.000,00 bila dibandingkan tahun 2020. Target capaian berada dalam kategori sangat berhasil di angka 126,06% dari target Rp270.683.000.000,00 terealisasi sebesar Rp341.227.100.000,00 di tahun 2021.

Produk pertanian bersifat mudah rusak dan lebih cepat mengalami penurunan mutu, sehingga harga jual di pasaran cenderung menjadi rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian. Dalam perkembangannya, teknologi pengolahan hasil pertanian di samping digunakan untuk mengurangi kerusakan juga untuk memperkaya zat gizi dan juga untuk merubah sifat bahan pangan sehingga sesuai dengan selera konsumen.

Kemampuan mengolah produk hasil pertanian masyarakat belum maksimal, dimana masih banyak ditemui sebagian besar komoditas pertanian yang diperjual belikan merupakan bahan mentah. Untuk mendorong nilai tambah produksi hasil pertanian, kelompok terus didorong untuk mengembangkan unit pengolahan hasil (UPH) terutama untuk komoditi strategis pertanian. Proses pengolahan ini sangat penting dilakukan sehingga tercipta peningkatan pendapatan bagi petani (poktan/gapoktan). Selama tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk pengembangan UPH lebih ke bimtek pengolahan hasil pertanian. Bimbingan teknis yang dilaksanakan meliputi bimbingan teknis pengolahan kakao (1 angkatan),



pengolahan mete (1 angkatan), pengolahan mokaf (1 angkatan), pengolahan aneka keripik (26 kelompok), dan pengolahan pasca panen hasil pertanian (14 kelompok).

Pemilihan kegiatan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- Sesuai dengan bahan baku yang tersedia
- Produk hasil olahan mempunyai prospek pasar yang baik/besar
- Pengoperasian alat tidak sulit
- Mudah merawat dan memperbaiki alat
- Spesifikasi alat
- Peralatan pengolahan dapat digunakan multi fungsi
- Tidak memerlukan biaya yang tinggi

Dari kegiatan tersebut, diharapkan kelompok memperoleh manfaat, yaitu:

- Adanya nilai tambah dari hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
- Tersedianya keanekaragaman makanan bagi keluarga atau masyarakat secara berkesinambungan yang sesuai dengan daya beli
- Pasaran dan permintaan aneka produk olahan cukup luas, bahkan cenderung meningkat
- Dapat mengoptimalisasikan sumberdaya yang ada di daerah-daerah, khususnya di pedesaan

Realisasi kegiatan berupa keikutsertaan kelompok-kelompok binaan maupun produknya dalam even-even promosi, penyelenggaraan lomba produk unggulan, pelatihan peningkatan kualitas pascapanen produk pertanian, serta diselenggarakannya pertemuan pelaku usaha komoditas pertanian unggulan.



Gambar 3.1 Kegiatan Pemasaran, Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan pemasaran hasil pertanian diantaranya adalah meningkatnya kualitas produk pertanian yang dihasilkan dengan adanya pelatihan pelatihan dan pengolahan hasil berdasarkan SOP pengolahan yang baik, serta semakin banyak kelompok tani/ gapoktan dan lain-lain yang mengikuti pameran, lomba-lomba dan promosi pemasaran hasil pertanian di lokal Kabupaten Gunungkidul maupun di luar Gunungkidul sehingga produk pertanian Kabupaten Gunungkidul semakin dikenal. Selain itu dilaksanakan juga target sukses



dengan melakukan kegiatan peningkatan produksi pangan utama, diversifikasi pangan, meningkatkan akses pemanfaatan pangan dan gizi, konsumsi pangan lokal, dan meningkatkan kualitas sumberdaya insani petani.

Dalam memberikan jaminan mutu pangan, upaya fasilitasi register atau pendaftaran P-IRT terhadap produk pertanian yang dihasilkan juga dilakukan. Jumlah pelaku usaha di seluruh Kabupaten Gunungkidul sekitar 1.000 orang, dan mereka masih memproses produknya dengan sederhana. Agar hasil nyata dari sosialisasi dan pelatihan P-IRT signifikan, fasilitasi dan bimtek secara intensif perlu untuk memperoleh sertifikat P-IRT. Selama Tahun 2021 jumlah pelatihan P-IRT dilakukan hanya 1 angkatan. Selesai pelatihan mereka baru mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk kelompok yang baru merintis usahanya diberikan bimbingan teknis mutu hasil produksi pertanian. Tahun 2021 bimbingan teknis mutu hasil dilaksanakan pada komoditas tanaman pangan (1 angkatan) dan komoditas perkebunan (1 angkatan) dan komoditas hortikultura (1 angkatan).

Capaian kinerja program kualitas penyuluhan sebesar rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil. Selama tahun 2021, keberhasilan penambahan kelompok yang menerapkan agribisnis terpadu mencapai target 100% yang ditetapkan sebanyak 117 kelompok. Kelompok yang telah berada di kelas kelompok utama ini diharapkan dapat menerapkan kegiatan agribisnisnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota kelompoknya dan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani yaitu dengan melakukan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan klasifikasi kemampuan kelompok tani. Tujuan pembinaan kelas kelompok tani adalah :

- Meningkatkan pemahaman dan wawasan anggota kelompok tani terhadap kemampuan kelompoknya.
- Meningkatkan klasifikasi kemampuan kelompok tani.

Peningkatan kemampuan kelompok tani diarahkan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Ciri kelompok tani yang kuat dan mandiri adalah:

- Adanya pertemuan/rapat anggota atau pengurus yang dilakukan secara berkala
- Penyusunan rencana kerja kelompok secara bersama, dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif.
- Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama
- Memiliki administrasi/Catatan setiap anggota rapih
- Memfasilitasi kegiatan usaha bersama di sektor hulu-hilir



Strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani yang telah dilakukan melalui pembinaan dari para penyuluh yang ada di 18 BPP di tiap kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui pembinaan berupa:

- Pengembangan sumberdaya manusia (SDM)
- Pengembangan modal
- Pengembangan usaha
- Pengembangan kelembagaan usaha

Penilaian kelas kemampuan kelompok tani rutin dilaksanakan setiap tahun. Sesuai pedoman pelaksanaannya, penilaian kelas kemampuan kelompok tani akan dilaksanakan di bulan September setiap tahun. Tujuan penilaian kelas kemampuan kelompok tani antara lain adalah :

- Mengetahui kemampuan kelompok tani yang ditinjau dari berbagai aspek
- Menyediakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan petani
- Mengetahui metodologi dan pemetaan kebutuhan penyuluhan pada masing-masing kelas kemampuan kelompok tani
- Menyediakan informasi yang lengkap dalam database kelompok tani melalui SIMLUHTAN
- Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani
- Sebagai dasar pemilihan metode/ strategi pembinaan kelompok tani sesuai kelas kemampuannya

Materi penyuluhan dipublikasikan melalui berbagai bentuk, di antaranya melalui media video penyuluhan dan media cetak seperti leaflet, informasi di laman pertanian.gunungkidulkab.go.id. Jumlah peningkatan kapasitas SDM penyuluh diukur melalui peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian. Peningkatan kapasitas SDM Petani dilaksanakan melalui pelatihan – pelatihan, magang, dan kunjungan lapang guna meningkatkan kompetensi anggota kelompok tani. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan 4 paket kegiatan kaji terap, 9 paket kegiatan demplot WKPP tingkat desa, 1 angkatan temu karya, 1 kali temu teknis.

Keberhasilan dalam membina kelompok didukung oleh lingkungan strategis dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:

- a. Keberadaan lembaga-lembaga penyuluhan pertanian di daerah yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian seperti: Bakorluh, Bapelluh, Kelembagaan yang menangani penyuluhan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok tani (Poktan);
- b. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya, dan Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP);
- c. Dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;



- d. Dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (FEATI).

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS (Survei Pertanian Antar Sensus) tahun 2018, jumlah rumah tangga usaha pertanian dan kelompok umur kepala rumah tangga merupakan tenaga kerja yang berusia ≥ 65 tahun sebanyak 49.320, kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 42.476, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 42.456, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 25.816, kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 8.815 dan disusul tenaga kerja kelompok usia < 25 tahun sebanyak 398. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

Bidang penyuluhan melalui BPP sebagai salah satu lembaga yang berfungsi mencetak sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, mempunyai tanggung jawab moral dalam mempertahankan generasi muda untuk terus tertarik dan bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu langkah-langkah konkret perlu dilakukan dengan mengenalkan remaja usia sekolah di mulai dari sekolah menengah tentang dunia pertanian yang menguntungkan dan menyenangkan. Upaya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten, yang diharapkan mampu menciptakan peluang kerja di tingkat lapangan, baik sebagai petani maju atau wirausahawan muda pertanian.



Gambar 3.2 Para Petani Milenial Pampang

Korporasi petani dibangun melalui pemberdayaan petani dengan mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani (kelompok/ gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 80 mengamanatkan Kelembagaan Ekonomi Petani dapat berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, menyatakan bahwa korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kepemilikan modal petani yang besar ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, skala ekonomi, daya saing, pendapatan petani dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani. Sampai Tahun 2020, Kabupaten Gunungkidul telah memiliki 185 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berbentuk koperasi tani, Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKMA).

Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun sistem pertanian yang tersebut, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut didukung Sumber Daya Pertanian sebagai berikut :



Tabel 3.6
Sumber Daya Pertanian Tahun 2021

No	Jenis Data	Jumlah
1	Penyuluh PNS	43 orang
2	Penyuluh Pertanian (CPNS)	23 orang
3	Penyuluh Pertanian (P3K)	47 orang
4	Penyuluh Pertanian Swadaya	144 orang
5	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	144 kelompok
6	Kelompok tani (Poktan)	3.345 kelompok
7	KEP	185 kelompok
8	Petani	148.913 orang

Tabel 3.7
Data Kelompok Tani Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelas Kelompok				Jumlah	
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Kelompok	Anggota
1	Wonosari	28	102	85	7	222	12.060
2	Tepus	12	74	36	1	123	3.449
3	Tanjungsari	21	50	33	5	109	7.512
4	Semin	97	185	63	11	356	16.537
5	Semanu	68	68	67	10	213	10.671
6	Saptosari	89	79	21	4	193	10.661
7	Rongkop	45	73	35	9	162	8.201
8	Purwosari	5	62	47	6	120	6.546
9	Ponjong	54	130	29	7	220	13.148
10	Playen	84	133	32	12	261	11.447
11	Patuk	48	92	53	12	205	10.393
12	Panggang	30	65	21	2	118	4.044
13	Paliyan	24	72	39	14	149	8.426
14	Nglipar	53	84	27	5	169	8.914
15	Ngawen	20	111	45	4	180	5.857
16	Girisubo	73	89	17	-	179	7.701
17	Gedangsari	97	55	26	4	182	8.859
18	Karangmojo	50	74	56	4	184	13.061
JUMLAH		898	1.598	732	117	3.345	167.487



Penyediaan Sarana Pendukungnya merupakan sub kegiatan pada DAK Pertanian 2021 yang dimanfaatkan oleh Bidang Penyuluhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan usahatani bagi petani, peran BPP diharapkan tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi juga harus mampu melakukan perakitan teknologi spesifik lokasi, model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitasi informasi dan dokumentasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi, musyawarah). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 maka kegiatan fisik penugasan Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukungnya untuk Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di laksanakan di 18 Kapanewon untuk Renovasi Ruang Data dan Informasi. Sarana dan lokasi DAK Pertanian yang dilaksanakan bidang penyuluhan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.8

Sasaran, Output dan Penerima Manfaat DAK Pertanian 2020 Bidang Penyuluhan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Volume		Lokasi
		Satuan	volume	
1	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	unit	18	18 BPP
	Penyediaan Sarana dan Prasarana BPP	Paket	18	18 BPP

Pagu anggaran yang dilaksanakan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana BPP tahun 2021 sebesar Rp1.710.000.000,00 yang digunakan untuk Renovasi Ruang Data dan Informasi. Realisasi untuk pembangunan ruang data sebesar Rp1.703.218.751,00. Sedangkan untuk pembelian Sarana Keinformasian BPP untuk mendukung pendataan, informasi dan kostratani. Mendapat anggaran DAK



Fisik sebesar Rp891.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp883.672.200,00 yang digunakan untuk pengadaan sarana AWR (Agriculture War Room) berupa PC All in One, LCD Projector, Wireless Sound Speaker, Multimedia Sound Speaker, Wireless Microphone System, UPS, Web Camera dan Sart TV Monitor 43 inch.



Gambar 3.3 DAK Sarana Prasarana BPP

Selain Dana DAK Fisik Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan juga mendapatkan dana DAK Non Fisik TA 2021 untuk Biaya Operasional Admin BPP. Ketentuan tentang kegiatan ini di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021. Untuk kegiatan pendataan pertanian dari dana DAK Non Fisik 2021 dipergunakan untuk operasional admin BPP, pembelian paket data di BPP, koordinasi ke dinas kabupaten/kota, bahan dan alat tulis kantor pelaporan dan dokumentasi dan penggandaan dokumen. Dari pagu Rp184.500.000,00 terealisasi sebesar Rp111.270.000,00



Gambar 3.4 DAK NF operasional admin BPP

Dana APBD yang digunakan untuk mencapai target sasaran 1 tersebut dari Program Penyuluhan Pertanian pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, dan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Program yang juga digunakan sebagai sarana untuk mencapai target 1 adalah program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.



Sedangkan untuk pengujian mutu berdasarkan pada Program Pengawasan Keamanan Pangan pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran dan realisasi dari program/kegiatan pendukung sasaran pertama seperti pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Program Sasaran 1

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	231.135.000	228.375.000	98,81	2.760.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	28.010.000	27.930.000	99,71	80.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	255.590.000	181.500.000	71,01	74.090.000	
		514.735.000	437.805.000	85,05	76.930.000	14,95
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4.999.500	4.999.500	100,00	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.052.606.000	1.007.447.760	95,71	45.158.240	
		1.057.605.500	1.012.447.260	85,05	45.158.240	4,27
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.475.000	12.475.000	100,00	-	
		12.475.000	12.475.000	100,00	-	0,00

Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran tahun 2021 telah dilaksanakan sebaik-baiknya secara maksimal meskipun belum semuanya mencapai target 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa pengadaan, dan tidak tersepanya beberapa operasional DAK Non Fisik karena adanya mutasi admin di BPP dari THL menjadi CPNS ataupun PPPK. Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan karena masih terdapat kegiatan yang sulit ditentukan tolak ukurnya. Untuk itu ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi kegiatan yang mengacu pada perjanjian kinerja.

Permasalahan:

1. Produk pertanian memiliki sifat dan karakteristik tidak tahan lama, bulky, perishable, mudah rusak.
2. Nilai ekonomis produknya tergantung pada tingkat kesegarannya sehingga perlu penanganan panen dan pascapanen yang baik.
3. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani.
4. Penanganan proses produksi di area penanganan panen dan proses berikutnya belum maksimal.
5. Pelaku usaha hasil pertanian belum terintegrasi dengan proses usaha yang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha tersebut dan kurang memanfaatkan kekuatan pola kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani.
6. Pelaku usaha hasil pertanian masih banyak yang belum memiliki ketertarikan untuk mengembangkan produk dengan jati diri sendiri atau sering menjual tanpa identitas mereka sendiri.
7. Rantai pemasaran yang cukup panjang dari lahan produksi ke konsumen menjadikan ketidakefisienan. Harga yang tinggi di tingkat konsumen cenderung tidak mendorong peningkatan harga di tingkat petani.



Solusi:

1. Pengolahan produk segar juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama dan menambah nilai tambah dan daya saing.
2. Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, pada tahun 2021 melakukan upaya dalam bentuk bantuan fasilitasi dan bimtek pengolahan hasil pertanian.
3. Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh di lokasi sentra produksi pangan berupa pendampingan proses pembelajaran dalam bentuk kursus tani dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok tani menerapkan teknologi
4. Penguatan kelembagaan usaha, kemitraan serta kewirausahaan agribisnis



Sasaran 2

“Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi Pangan Meningkat”

Ketahanan pangan dan gizi, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu:

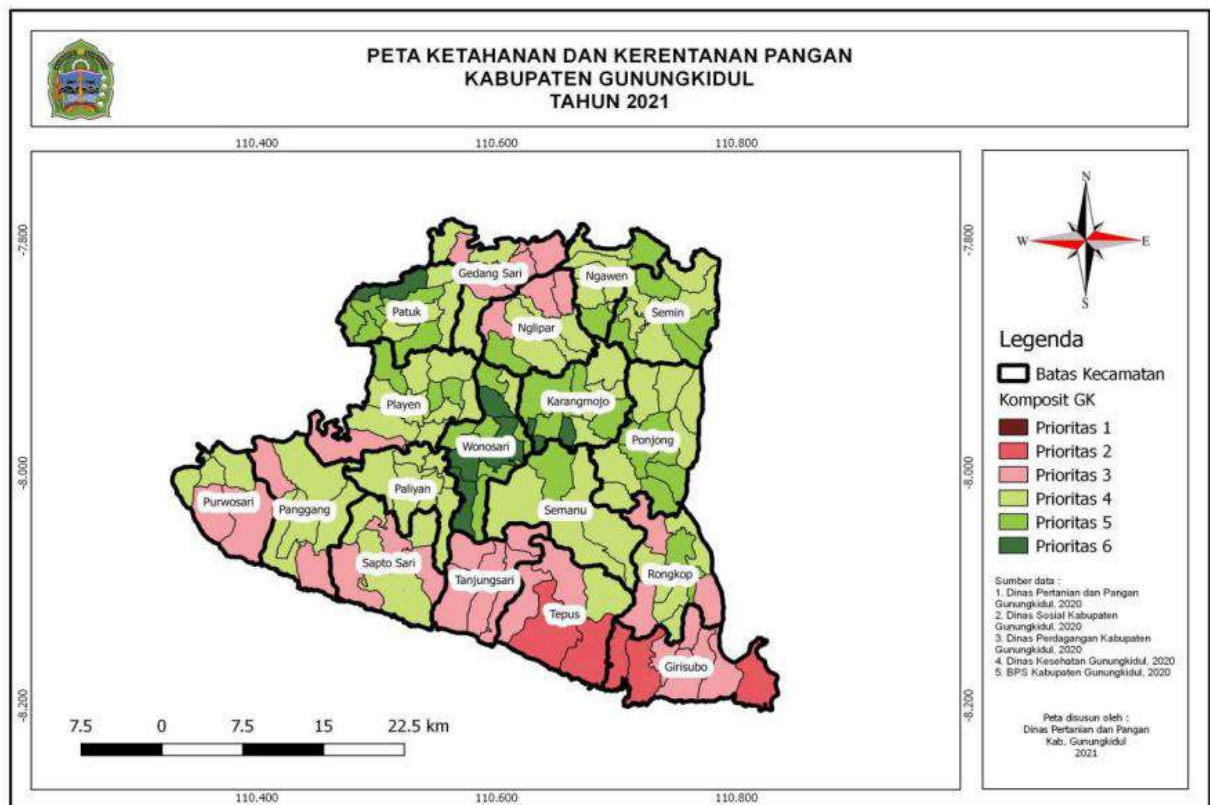
- a. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata;
- b. Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta
- c. Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Ketiga komponen tersebut dapat diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, apabila: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan; (2) Melaksanakan diversifikasi pangan untuk mendorong konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan



aman; (3) Menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan selama periode 2016-2021 telah mencatatkan hasil yang positif bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi, yang didukung dengan membaiknya situasi ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau dikenal dengan nama *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. 8 kapanewon memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sejak 2017.



Gambar 3.5 Peta Komposit Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

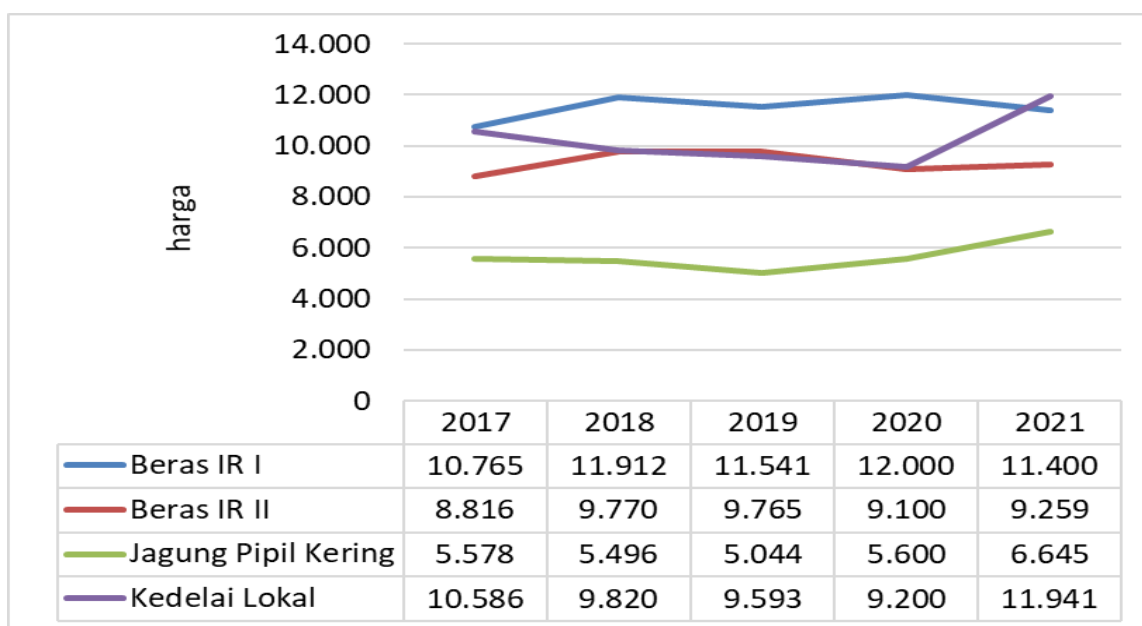
Peta komposit menunjukkan 144 desa di Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat kerentanan dan ketahanan pangan yang beragam, ditunjukkan dengan warna peta merah dan hijau yang berbeda. Wilayah yang sudah memiliki tingkat ketahanan yang cukup hingga tinggi ditunjukkan dengan warna peta hijau muda hingga hijau tua, ada di 8 (delapan) kapanewon, yaitu Kapanewon Paliyan, Kapanewon Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Ngawen, dan Kapanewon Semin. Sedangkan wilayah dengan sebagian desanya masih memiliki potensi rentan pangan dan agak rentan pangan



antara lain Kapanewon Panggang (2 desa), Kapanewon Purwosari (2 desa), Kapanewon Saptosari (3 desa), Kapanewon Tanjungsari (5 desa), Kapanewon Tepus (4 desa), Kapanewon Rongkop (3 desa), Kapanewon Girisubo (8 desa), Kapanewon Playen (1 desa), Kapanewon Gedangsari (4 desa), dan Kapanewon Nglipar (3 desa). Oleh karena itu, wilayah-wilayah ini menjadi prioritas agar ketahanan pangannya lebih baik.

Membaiknya situasi ketahanan pangan tersebut disumbang oleh berbagai capaian pada aspek-aspek ketahanan pangan seperti:

1. Penyediaan Pangan, dimana keberhasilan meningkatnya status ketahanan pangan tidak terlepas dari meningkatnya produksi beragam jenis bahan pangan sektor pertanian dalam arti luas.
2. Keterjangkauan Pangan, merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Selanjutnya harga pangan juga memberikan pengaruh terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Selama periode tahun 2017-2021 hampir semua komoditas cenderung tidak banyak mengalami fluktuasi harga atau relative stabil.



Grafik 3.1. Harga komoditas pangan

Pengumpulan informasi harga komoditas pertanian tingkat produsen, pada tahun 2021 dilaksanakan di Kapanewon Wonosari, Karangmojo, Ponjong, Playen, Paliyan, Panggang, Nglipar, Tepus, Semin. Sedangkan untuk tingkat konsumen dilaksanakan di Pasar Argosari, Wonosari.



Untuk pemantauan harga produk pertanian secara rutin telah dilaksanakan, terutama pada komoditas beras (sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Gunungkidul), jagung pipilan, kedelai, minyak goreng, bawang merah, telur ayam ras, gula pasir, daging ayam, daging sapi, dan cabai. Pantauan dilaksanakan oleh enumerator harga di tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen di beberapa titik pantau.

Dengan pola produksi yang mengikuti musim, maka harga produk pertanian akan berfluktuasi. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi sehingga harga cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat pasokan berkurang harga cenderung meningkat sehingga dapat memberatkan konsumen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya stabilisasi harga di tingkat petani sebagai salah satu upaya perlindungan petani melalui kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Untuk Analisa Usaha Tani (AUT) selama tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan lokasi di KT Ngudi Sari (AUT Hortikultura), KWT Ngudi Sari (AUT Tanaman Pangan), KT Purbaya (AUT Peternakan) dan KT Putro Makaryo (AUT Perkebunan).

3. Pemanfaatan Pangan, dimana dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari keluarga. Tahun 2021 kegiatan sosialisasi pangan lokal berbasis B2SA dilaksanakan di BPP semin, BPP Ngawen dan BPP karangmojo dengan peserta 50% dari KWT, dan 50% dari undur TP PKK Kapanewon, TP PKK Kalurahan, pemerintahan kalurahan, Pengurus Gapoktan dan PPL Swadaya. Kegiatan yang semula direncanakan di 18 BPP, karena adanya *refocusing* hanya dilaksanakan di 3 BPP.

Rasio yang digunakan pada sasaran 2 adalah jumlah produksi padi, ketersediaan beras, PPH serta jumlah penduduk dengan kurun waktu 1 tahun yaitu 2020. Perkembangan harga komoditas pertanian ditingkat produsen maupun konsumen perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 4 (empat) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:								
	Ketersediaan Pangan (Beras)	Ton	126.762	125.111	162.167	129,62	Sangat tinggi	125.111	101,32
2	Harga pangan yang terjangkau dan terkendali								
	Beras IR I	Rp	12.000	10.815	11.400	105,41	Sangat tinggi	10.815	110,96
	Beras IR II	Rp	9.100	9.810	9.259	94,38	Sangat tinggi	9.810	92,76
	Jagung Pipil Kering	Rp	5.600	5.250	6.645	126,57	Sangat tinggi	5.250	106,67
	Kedelai Lokal	Rp	9.200	8.400	11.941	142,15	Sangat tinggi	8.400	109,52
3	Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	Indeks	87	89,2	88,20	98,88	Sangat tinggi	89,2	97,42
4	Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	Indeks	85	91	84,90	93,30	Sangat tinggi	91	92,86
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					112,90	Sangat tinggi		112,90

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 112,90% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Sasaran kedua ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan pada indikator pertama ketersediaan pangan (beras) meningkat 35.405 ton dibandingkan realisasi tahun 2020, yang berarti konsumsi energi yang ideal telah mulai diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan untuk indikator kedua berupa harga pangan yang terjangkau dan terkendali menunjukkan penurunan harga pada beras IR I (-Rp600,00). Angka realisasi pada indikator yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2020 ini dengan realisasi pada tahun 2021 pada capaian beras IR II (Rp159,00), jagung pipil kering (Rp1.045.00) dan nilai PPH (1,30 indeks) dan nilai NBM (0,4 indeks).

Sebagai bentuk keberlanjutan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal kegiatan yang telah diimplementasikan meliputi: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan



Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP. Melalui 3 (tiga) kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).



Gambar 3.6 Kegiatan Ketahanan Pangan

Tahun 2021, Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan bantuan hibah untuk replikasi KRPL masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 untuk KRPL baru di 14 KWT, 4 KWT KRPL PIWK masing-masing Rp15.000.000,- dan 10 KWT KRPL Lama difasilitasi biaya konsumsi untuk pertemuan sebanyak 4 kali. Kegiatan Pengembangan Pangan Perkotaan dilaksanakan di lahan pekarangan Lembaga Pendidikan Taman Pintar Nur Aini Jeruksari, Wonosari. Dengan pengembangan buah-buahan senilai Rp2.000.000,-



Gambar 3.7 Kegiatan DAK NF Pekarangan Pangan Lestari

Dana DAK Non Fisik Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan dilaksanakan untuk 7 KWT pada tahun 2021 dengan sistem swakelola per KWT Rp 55.000.000,- KWT yang menerima DAK NF tahun 2021 terdiri dari KWT Duwet (Duwet, Jerukwudel, Girisubo), KWT Khusnul Khotimah (Sambeng, Ngalang,



Gedangsari), KWT Berkah Wanita (Banjardowo, Gedangrejo, Karangmojo), KWT Sentulsari (Sambeng 2, Sambirejo, Ngawen), KWT Ngudi Lestari (Kepek, Kepek, Saptosari), KWT Rejeki Laris (Prau, Girimulyo, Panggang), dan KWT Ngudi Rejeki (Duwet, Karangwuni, Rongkop).

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu.

Tabel 3.11
Indeks Neraca Bahan Makanan Ketersediaan Per Kapita

No	Bahan makanan	2020		2021	
		Energi (kkal/hari)	Protein (g/hari)	Energi (kkal/hari)	Protein (g/hari)
1	Padi-padian	1.919	47,51	1.907	47.41
2	Makanan Berpati	186	1,26	189	1.24
3	Gula	91	0,08	100	0.08
4	Buah/biji berminyak	314	19,72	219	17.15
5	Buah-buahan	59	0,62	51	0.61
6	Sayur-sayuran	38	2,19	71	3.91
7	Daging	104	6,70	100	6.84
8	Telur	31	2,29	31	2.31
9	Susu	3	0,15	4	0.21
10	Ikan	46	8,48	28	5.20
11	Minyak/Lemak	213	0,00	272	0.00
12	Lemak	1	0,00	0	0.00
NABATI		2.607	71,38	2.809	70,41
HEWANI		294	10,92	163	14,55
JUMLAH		2.901	82,3	2.972	84,96

Berdasarkan perhitungan NBM, diperoleh bahwa ketersediaan energi untuk tahun 2021 untuk nabati sebesar 2.809 kkal/kap/hari dan untuk hewani sebesar 163 kkal/kap/hari. Sedangkan ketersediaan protein nabati sebesar 70,41 gram//hari dan hewani sebesar 14,55 gram/hari. Pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 direkomendasikan nilai standar minimal untuk ketersediaan energi minimal sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari. Sedangkan untuk konsumsi energi ditetapkan minimal sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan AKE dan AKP



pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin, serta komposisi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Skor PPH menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, dimana semakin beragam, semakin tinggi pula skor PPH nya. Nilai maksimal untuk skor PPH ideal adalah 100.

Tabel 3.12
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

No	Bahan Makanan	Gram/ Kap/ Hari	Perhitungan Skor PPH					
			kalori	%	%AKE	Skor Aktual	Skor Maks	SKOR PPH
1	Padi-padian	537.9	1907	64.2	79.5	32.1	25	25
2	Umbi-umbian	168.2	201	6.8	8.4	3,4	2.5	2.5
3	Pangan hewani	102.3	162	5.4	6.7	10.9	24	13.5
4	Minyak dan lemak	30.6	273	9.2	11.4	4,6	5	5
5	Buah/ Biji Berminyak	6.3	12	0,4	0.5	0,2	1	0.25
6	Kacang-kacangan	51.4	210	7.1	8.7	14.1	10	10
7	Gula	27.5	100	3.4	4.2	1,7	2.5	2.09
8	Sayur dan buah	231.9	106	3.6	4.4	17.8	30	22.1
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0
Total		1,156	2,971	100	123.8	75	100.0	80.4

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2021 sebesar **80,4**. Empat (4) kelompok pangan yang telah di atas standar, yaitu padi-padian; umbi-umbian; buah/biji berminyak; dan kacang-kacangan. Sedangkan kelompok pangan yang masih di bawah standar yaitu pangan hewani; minyak dan lemak; gula serta sayur dan buah. Kelompok pangan hewani dikonsumsi masyarakat utamanya sebagai komponen lauk. Dengan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan kelompok pangan yang lain, dan belum seluruhnya mampu untuk mengakses kelompok pangan ini dalam jumlah yang cukup, dengan capaian skor untuk kelompok pangan ini 10,9 dari skor maksimal yang ideal yaitu 24 atau sekitar 45,42% dari capaian skor ideal.



Kegiatan peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan melalui diseminasi keamanan pangan melakukan pengambilan bahan pangan segar berupa sayur dan buah di pasar tradisional dan di tingkat produsen (Kelompok Tani) untuk dilakukan uji laboratorium bahan pangan segar di Laboratorium Kesehatan DIY untuk mengetahui cemaran kandungan pestisida yang ada pada sayuran dan buah-buahan. Target sampel bahan pangan yang diuji sebanyak 14 sampel yang diambil dari Pasar Playen 6 sampel (cabai rawit merah, cabai merah besar, gambas, kobis, pare pait dan melon), Petani Playen 2 sampel (kacang panjang dan mentimun), Pasar Wonosari 3 sampel (sawi putih, terong ungu dan cabe rawit merah) dan Pasar Semin 3 sampel (cabai hijau besar, tomat dan buncis). Dari 14 sampel hasil pengujian ada 4 sampel positif mengandung organofosfat yang ditemukan di cabai rawit merah dan cabai merah besar (pasar playen), cabai rawit merah 9 pasar wonosari), dan cabai hijau besar (pasar semin).

Uji laboratorium bahan pangan segar dilakukan untuk mengetahui cemaran kandungan pestisida yang ada sayuran dan buah-buahan. Uji kandungan cemaran yang dilakukan dengan menggunakan metode spesifikasi kromatografis lapis tipis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya cemaran karbamat, organoklorin dan organofosfat pada sayur atau buah. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Apabila masuk ke dalam tubuh bersama dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang melebihi batas maksimal, pestisida ini dapat menimbulkan keracunan karena bersifat sebagai racun saraf. Oleh sebab itu, penggunaan pestisida ini dalam sektor pertanian diawasi dengan ketat agar keracunan akibat penggunaan pestisida ini dapat ditekan. Dampak penggunaan terhadap lingkungan tidak terlalu bahaya karena pestisida ini persistensi dalam tanah. Dalam tanah residu pestisida ini hilang atau terurai. Berbagai faktor yang menyebabkan residu pestisida ini hilang atau terurai meliputi pencucian, pelapukan, penguapan, dan enzimatik.

Senyawa organoklorin merupakan bahan kimia yang ada pada pestisida dan digunakan petani untuk membasmi hama, namun disamping manfaatnya yang dapat meningkatkan hasil pertanian, pestisida dapat membahayakan kesehatan dan dapat mencemari lingkungan. Pestisida yang masih sering digunakan adalah Organofosfat. Organofosfat adalah zat kimia sintesis yang terkandung pada pestisida untuk membunuh hama (serangga, jamur, atau gulma). Organofosfat juga digunakan dalam produk rumah tangga, seperti pembasmi nyamuk, kecoa, dan hewan pengganggu lainnya. Keracunan organofosfat dapat terjadi melalui kulit, mata, mulut jika tertelan, dan hidung jika terhirup dengan dosis berlebih. Keracunan melalui saluran pencernaan dapat terjadi karena makanan terpapar organofosfat atau jika zat ini terbawa angin masuk ke mulut.



Usaha lain yang telah dilakukan untuk keamanan pangan dengan melakukan sosialisasi Peraturan daerah No 13 Tahun 2016 tentang Keamanan pangan yang dilakukan sebanyak 60 kali di 18 Kapanewon

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama masyarakat untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan secara lebih merata, dimana kondisi sekarang dari 144 desa di Kabupaten Gunungkidul tidak ada desa yang masuk kategori sangat rentan, tetapi masih terdapat 5 desa yang memiliki potensi rentan, 30 desa potensi agak rentan, 66 desa cukup tahan, 33 desa potensi tahan, dan 10 desa sangat tahan. Adapun 5 (lima) desa yang masuk kategori rentan pangan tersebut ada di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Girisubo (Desa Songbanyu, Desa Balong, dan Desa Jepitu) dan Kecamatan Tepus (Desa Purwodadi dan Desa Tepus).

Penyebab 5 (lima) desa tersebut masuk kategori rentan pangan, sebagian besar karena aspek pemanfaatan pangan, yaitu indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk tidak seimbang/tidak memadai.

Dalam melaksanakan sasaran 2 dianggarkan sebesar Rp2.749.320.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp2.615.805.760,00 (95,14%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp13.426.500,00 (0,49%). Program yang mendukung sasaran 2 ini adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Program Sasaran 2

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	562.105.000	561.603.500	99,91	501.500	
		562.105.000	561.603.500	99,91	501.500	0,09
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2.450.000	2.450.000	100,00	-	



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000	59.700.000	99,50	300.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	2.000.000	2.000.000	100,00	-	
		62.450.000	64.150.000	102,72	300.000	0,48
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	100,00	-	
		4.000.000	4.000.000	100,00	-	0,00
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	535.950.000	523.325.000	97,64	12.625.000	
		535.950.000	523.325.000	97,64	12.625.000	2,36

Permasalahan:

1. Masih rendahnya daya beli masyarakat
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang
3. Rapat-rapat resmi kantor di kantor-kantor belum semua menggunakan pangan lokal, karena sasaran sosialisasi seharusnya juga termasuk para penyedia jasa boga dan petugas yang menyiapkan konsumsi kegiatan



Solusi:

1. Pemberdayaan pemanfaatan pekarangan
2. kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penganeekaragaman pangan
3. Sosialisasi khusus bagi para penyedia jasa boga, terutama yang menyediakan konsumsi bagi rapat-rapat di OPD. Sumber dana boleh dari mana saja, APBN atau APBD Provinsi ataupun APBD Kabupaten.

	Sasaran 3 <i>“Produksi Tanaman Pangan Meningkat”</i>
---	---

Dari luas total lahan pertanian bukan sawah, Kabupaten Gunungkidul memiliki luas tegal/kebun 64.708 ha dari total 117.281 ha atau sekitar 55,17% yang berpotensi untuk budidaya pertanian. Sisanya berupa lahan perkebunan, hutan rakyat, hutan negaara, perikanan dan sekitar 164 ha tidak diusahakan.

Untuk lahan sawah, selama tahun 2021 jumlah luasan yang digunakan untuk ditanami padi 7.856 Ha yang terdiri dari luas lahan sawah yang ditanami satu kali dalam setahun ada 367 ha, yang ditanami 2 kali dalam setahun 6.608 ha dan yang ditanami 3 kali atau lebih dalam setahun ada 881 ha.

Tabel 3.14
Laporan Penggunaan Lahan Sawah di Kabupaten Gunungkidul

No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak ditanami padi		
		Satu kali	Dua kali	Tiga kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	251,0	1.365,0	571,0	0,0	0,0	2.187,0
	b. Tadah hujan	116,0	5.243,0	310,0	0,0	0,0	5.669,0
	c. Rawa pasang surut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Rawa lebak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah Lahan Sawah	367,0	6.608,0	881,0	0,0	0,0	7.856,0



Tabel 3.15
Laporan Penggunaan Lahan Di kabupaten Gunungkidul

No	Penggunaan Lahan	Luas
(1)	(2)	(3)
1.2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah	
	a. Tegal/kebun	64.708,0
	b. Ladang/huma	0,0
	c. Perkebunan	411,0
	d. Hutan rakyat	27.731,0
	e. Padang penggembalaan/padang rumput	0,0
	f. Hutan negara	13.527,0
	g. Sementara tidak diusahakan *)	164,0
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)	10.740,0
	Total luas lahan pertanian bukan sawah	117.281,0
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) **)	23.399,0
3.	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Pertanian	148.536,0
4.	LUAS WILAYAH KECAMATAN:	148.536,0

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dilakukan dengan mengembangkan model pertanian terpadu seiring dengan peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman. Pengembangan teknologi yang di gunakan diarahkan dan mengutamakan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan mengintegrasikan teknologi (tinggi/modern) dengan pemanfaatan sumberdaya dan kearifan lokal,

Sub sektor tanaman pangan memiliki peran yang strategis terhadap ketahanan pangan dalam hal penyediaan kebutuhan pangan pokok terutama beras, jagung dan kedelai, serta berperan dalam menopang sumber penghidupan rumah tangga petani, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan petani. Berbagai tantangan dan permasalahan seperti peningkatan jumlah penduduk, bencana alam di beberapa daerah, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian dan daerah sentra produksi pangan yang masih belum merata membutuhkan upaya sinergi dan koordinasi yang harmonis dengan berbagai pihak/ instansi lain secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya menyelesaikan tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian seperti kerja sama dengan dinas lain ataupun melalui Komisi B DPRD, dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian sangatlah diharapkan untuk pengembangan dan penerapan teknologi, dukungan sarana pengendalian, dan penanganan pasca panen.



Tahun 2020, Kementerian Pertanian kembali melanjutkan program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai yang telah dicanangkan tahun 2015 untuk mendorong dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Program Upsus dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan keterpaduan program dan kegiatan mulai dari pusat sampai tingkat lapangan.

Capaian sasaran 3 tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan								
	Padi	Ton	289.076	291.962	301.160,97	103,15	Sangat tinggi	291.962	103,15
	Jagung	Ton	275.894	209.500	275.913,74	131,70	Sangat tinggi	209.500	131,70
	Kedelai	Ton	4.753	7.500	4.394,09	58,59	Rendah	7.500	58,59
	Ubi Kayu	Ton	1.001.629	885.110	829.556,13	93,72	Sangat Tinggi	885.110	93,72
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN						96,79	Sangat Tinggi		96,79

Dari empat indikator kinerja utama, menghasilkan 3 indikator kinerja dengan capaian kategori sangat tinggi (capaian di atas 91%), 1 indikator rendah (51-65%). Sasaran ketiga tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan pada indikator memuat capaian produksi dari padi meningkat sebesar 12.085,47 ton dibandingkan tahun 2020. Untuk capaian target jagung juga meningkat 19,74 ton. Sedangkan untuk kedelai menurun 358,91 ton dan ubi kayu juga menurun 172.072,87 ton bila dibandingkan capaian tahun 2020.

Bila dilihat dari tabel 3.15, produksi padi antara tahun 2017-2021 meningkat rata-rata 1,30% per tahun. Peningkatan produksi padi didukung karena peningkatan produktivitas sebesar 12,22ku/ha, walaupun luas tanam mengalami penurunan sekitar -5,87% per tahun dan luas panen juga mengalami penurunan -2,53%. peningkatan produktivitas ini dapat dilakukan penanganan pertanian yang intensif, yaitu peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.



Tabel 3.17
Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas panen , Produksi dan Produktivitas Padi
Tahun 2017-2021

No	Kriteria	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	60.686	59.818	59.448	58.933	56.648,8	-5,87
2	Luas Panen	59.197	57.809	54.504	54.948	56.624,0	-2,53
3	Produksi	293.358	298.454	297.885	290.619	301.161,0	1,30
4	Produktivitas	49,56	51,63	59	57	57,2	12,22

Kegiatan fasilitasi penerapan budidaya padi pada tahun 2021 mencakup kegiatan budidaya padi inbrida, budidaya padi hibrida, budidaya mina padi, budidaya padi jajar legowo super, dan budidaya padi dengan pupuk hayati. Dalam rangka mengamankan areal tanaman dari gangguan OPT, telah dilaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), gerakan pengendalian OPT, dan penguatan perlindungan tanaman pangan.

Komoditas padi capaian target produksinya didukung oleh padi sawah dan padi ladang. Produktivitas dari padi ladang banyak ditentukan oleh intensitas curah hujan. Di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2021 keadaan jumlah curah hujan 2591 mm atau rata-rata 215,92 mm, sedangkan untuk jumlah hari hujan 161,50 selama tahun 2021 dengan rata-rata hari hujan 12,63 hari.

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (losses).



Gambar. 3.7 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan



Strategi operasional peningkatan produksi tanaman pangan ditempuh melalui dua strategi utama:

- a. Perluasan Areal Tanam yang dilakukan melalui upaya: peningkatan indeks pertanaman (IP) pada lahan eksisting melalui optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, pencetakan lahan baru/cetak sawah, pemanfaatan lahan terlantar, dan penanaman tumpang sari di lahan perkebunan dan kehutanan.
- b. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui upaya: peningkatan penggunaan benih unggul bermutu, perbaikan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), pengamanan tanaman dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan), serta penguatan penanganan panen dan pascapanen.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produksi padi, diantaranya dengan : 1) pangadaan obat-obata/ pestisida untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman, 2) Penggunaan benih unggul dan pengelolaan budidaya tanaman yang baik, 3) Adanya pelatihan dan bintek bagi petani untuk meningkatkan budidaya yang baik, 4) Peningkatan sarana irigasi pertanian, 5) Fasilitasi PSP, 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian (DAK Pertanian) dan 7) Fasilitasi verifikasi LP2B.



Dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi dan penurunan susut hasil dialokasikan bantuan sarana pascapanen padi yang terdiri dari: power thresher traktor roda 2, pompa air, handsprayer electric dan prasarana pertanian seperti sumur dangkal/dalam, dam parit, RJIT dan irigasi perpompaan/perpipaan.

Tabel 3.18
Data Sarana Prasarana Pertanian Tahun 2021

No	Jenis Alsintan	Jumlah Ketersediaan Alsintan Berdasar Sumber Dana			Jumlah (Unit)
		APBD	APBN	APBD Provinsi	
1	Traktor roda 2	146	8	40	194
2	Pompa Air 3" (bensin)		21	4	25
3	Power Thresher		3	12	15
	Power Thresher mobile			1	1
	Pompa Air 3" (solar)		2		2
	Pompa Air 4" (solar)		7		7
4	Corn Sheller		5		5
5	Cultivator	82	8		90
6	Handsprayer Elec		10		10
7	Sumur Sedang	10	1		11
8	Sumur Dangkal	4	7		11
9	Sumur Dalam	2			2



No	Jenis Alsintan	Jumlah Ketersediaan Alsintan Berdasar Sumber Dana			Jumlah (Unit)
		APBD	APBN	APBD Provinsi	
10	Dam Parit		2		2
11	RJIT		15		15
12	Irigasi Perpompaaan		3		3
13	Irigasi Perpipaan		1		1
jumlah		244	93	57	394

Persentase peningkatan produksi jagung dapat dicapai melebihi target. Target produksi jagung tahun 2021 sebesar 209.500 ton dengan realisasi sebesar 131,70% atau 275.913,74 ton. Hal ini disebabkan karena : Petani lebih memilih menanam jagung karena lebih tahan serangan hama. Selain itu jagung tidak terlalu butuh pengairan tinggi dibanding padi dan bantuan benih jagung bermutu tinggi sehingga meningkatkan produksi jagung. Pada Tabel 3.19 disampaikan bahwa luas panen jagung tahun 2021 meningkat (2.133 ha) dibanding tahun 2020, tetapi angka provitas menurun dari 50,82 ku/ha di tahun 2020 menjadi 50,11% di tahun 2021. Kegiatan peningkatan produksi jagung didukung dari upaya khusus yang dilakukan Kementerian Pertanian dan pengawalan yang intensif sampai tingkat lapang. Peningkatan produksi jagung tidak terlepas dari peran produktivitas dan luas panen.

Seperti program pemerintah terhadap padi, untuk jagung, peningkatan produksi yang sangat signifikan tersebut juga merupakan dampak dari program pengembangan jagung. Pada Tabel 3,19 juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan untuk produksi jagung sebesar 21,70 yang juga didukung oleh peningkatan dari luas tanam 6,12%, luas panen 9,44% sehingga produktivitas juga menunjukkan peningkatan pada rata-rata pertumbuhan petahun di angka 11,88%.

Tabel 3.19
Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi
dan Produktivitas Jagung Tahun 2017-2021

No	Kriteria	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	53.324	52.601	51.116	55.101	55.934	6,12
2	Luas Panen	48.927	50.520	50.677	52.946	55.059	9,44
3	Produksi	206.526	230.510	256.182	274.391	275.913	21,70
4	Produktivitas	42,15	45,63	50,12	51,82	50,11	11,88

Dengan luas areal tanam jagung 55.934 ha, kegiatan penguatan perlindungan tanaman jagung juga dilakukan dengan gerakan pengendalian OPT. Penanganan pascapanen jagung juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil dan penurunan susut. Pada tahun 2021 disalurkan bantuan sarana untuk



mendukung pengembangan komoditas tanaman jagung berupa corn sheller 5 unit dari dana APBN (tabel 3.18).

Produksi kedelai memiliki pola yang sama dengan luas panen, yang menunjukkan bahwa penurunan produksi dipengaruhi oleh penurunan luas panen. Penyebab utama penurunan areal tanam yang disebabkan oleh kurangnya gairah petani menanam kedelai karena harga kedelai ditingkat petani yang sering tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan dan adanya kedelai impor dengan harga yang lebih murah.

Tabel 3.20
Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi
dan Produktivitas Kedelai Tahun 2017-2021

No	Kriteria	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	3.318	5.256	4.910	3.392	4.067	-6,30
2	Luas Panen	3.318	5.209	3.095	3.775	3.544	-10,88
3	Produksi	3.946	6.053	3.072	4.722	4.394	10,35
4	Produktivitas	11,9	11,62	9,93	12,51	12,4	9,96

Rekomendasi sebagai rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja peningkatan produksi kedelai yang ditawarkan tahun yang akan datang antara lain : mengalokasikan bantuan saprodi budidaya kedelai, peningkatan perlindungan dari serangan OPT, peningkatan fasilitasi sarana pasca panen kedelai serta penguatan agroekosistem oleh para penyuluh dan diharapkan petani melakukan monitoring dan evaluasi pertanaman sejak dini guna mengantisipasi gangguan dan kerusakan akibat hama dan penyakit. Untuk mendukung pencapaian target di tahun 2021, luas tanam kedelai bertambah 675 ha dibandingkan tahun 2020. Dari luas tanam 4.067 ha di tahun 2021 sekitar 2.550 ha diantaranya telah tertanami bibit kedelai bantuan pemerintah bulan Februari dan Maret 2021. Sisanya ditanam pada bulan Juni 2021 untuk musim tanam ketiga.



Dengan rata-rata pertumbuhan luas panen kedelai -10,88% menunjukkan bahwa petani perlu untuk mendapatkan banyak arahan untuk kembali berminat menanam komoditas kedelai ini. Untuk itu perlunya penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani serta melakukan edukasi dan promosi serta pengembangan olahan kedelai perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan minat petani menanam kedelai di tahun-tahun mendatang.



Beberapa dukungan untuk peningkatan produktivitas kedelai antara lain perbaikan penerapan pengelolaan teknologi budidaya seperti peningkatan penggunaan bibit unggul bersertifikat, peningkatan perlindungan tanaman dari gangguan OPT serta perbaikan penanganan pascapanen.



Ubikayu merupakan salah satu bahan pangan pengganti beras yang cukup penting peranannya dalam menopang ketahanan pangan suatu wilayah. Sesuai dengan simbol daerah Kabupaten Gunungkidul terdapat lambang tanaman ubi kayu, yang menjelaskan bahwa sebagian besar lahan di kabupaten Gunungkidul memproduksi ubi kayu. Hal ini dikarenakan peranan ubikayu sebagai sumber bahan pangan pengganti bahan pangan utama yaitu beras. Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam merubah pola konsumsi masyarakat yang sudah terbentuk selama ini, namun demi keamanan pangan suatu wilayah perlu kiranya sosialisasi diversifikasi pangan berbahan ubikayu atau singkong sebagai bahan pangan alternatif selain beras atau jagung

Upaya untuk peningkatan produktifitas ubi kayu sebagai upaya tindak lanjut diantaranya dengan penggunaan benih unggul, ubikayu diusahakan secara tumpang sari dengan komoditas lain, umur panen ubi kayu tergantung harga pasar jika harga murah maka umur panen panjang, pemanenan menunggu harga tinggi.

Tabel 3.21
Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas panen , Produksi
dan Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017-2021

No	Kriteria	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
1	Luas Tanam	45.794	45.816	41.264	44.025	43.088	-5,41
2	Luas Panen	49.487	45.472	45.817	43.855	43.088	-7,33
3	Produksi	924.751	794.954	714.826	1.001.629	829.556,13	5,79
4	Produktivitas	186,87	174,82	156,02	228,4	118,43	-58,83

Penurunan produksi dari ubi kayu dengan melihat tabel 3.21 terlihat pada luas tanam, luas panen dan produktivitas. Tahun 2021 dengan rata-rata tingkat curah hujan menengah 215,92 mm (antara 100-300 mm) juga mempengaruhi jumlah kadar pati dalam ubi kayu, sehingga tidak tercapai berat maksimal. Rata-rata pertumbuhan produksi ubi kayu dari taun ke tahun tercatat meningkat (5,79%), tetapi bila dibandingkan tahun 2020, produksi ubi kayu tahun 2021 menurun -172.073 ton dengan capaian ada di 829.556,13 ton.



Konsumsi ubi kayu dibedakan dalam bentuk konsumsi langsung sebagai bahan makanan dan dalam bentuk pakan dan diolah untuk makanan. Konsumsi ubi kayu yang diolah menjadi makanan semakin lama mempunyai pasar yang besar dan mempunyai porsi yang hampir mendekati konsumsi sebagai pakan, hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan ubi kayu semakin berkembang.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan pada tahun 2021 juga telah dilaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi. Sasaran kegiatan adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian. Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik. Untuk alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2021 juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 7/KPTS/2021, seperti yang tertera pada tabel 3.22 di bawah ini.

Bimbingan teknis penyusunan RDKK pupuk bersubsidi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan atau menambah pengetahuan kelompok tani dalam menyusun RDKK pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi perlu disusun kelompok tani guna pengajuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang distribusinya dilaksanakan secara tertutup, yaitu hanya petani-petani yang terdaftar dalam RDKK pupuk bersubsidi yang diperbolehkan membeli pupuk subsidi.

Tabel 3.22
Alokasi Pupuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021

No	JENIS PUPUK	2017	2018	2019	2020	2021(ton)
1	Urea	10.475	10.654,3	8.762,75	11.041,41	15.000
2	NPK	6.431,1	5.930,4	5.459,25	5.708,04	7.057
3	SP36	1.068,1	869,66	738,20	675,81	711
4	ZA	782,4	796,95	757,85	712,73	399
5	Organik	280	276,22	371,36	130,59	113

Dana Alokasi Khusus tahun 2021 yang dilaksanakan Bidang tanaman Pangan dan Bidang Perkebunan dan Hortikultura pada pembangunan infrastruktur pemanfaatan sumber sumber air. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 Kebijakan pemanfaatan DAK Fisik Pertanian diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian serta kinerja pembangunan pertanian.



. Kegiatan DAK bidang pertanian untuk pembangunan dam parit dan pembangunan irigasi air tanah dangkal ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan. Lokasi hasil CPCL kelompok sebagai penerima pembangunan dam parit dan pembangunan irigasi air tanah dangkal seperti yang tertera pada tabel 3.23 dibawah ini

Tabel 3.23
Kelompok Penerima Pembangunan Dam Parit dan
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal DAK Pertanian 2021

No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi
1	Pembangunan Sumber - Sumber Air			
	a Pembangunan Irigasi Dam Parit	unit	1	KT Sido Mulyo, Krinjing, Mertelu, Gedangsari
	b Pembangunan Irigasi Dam Parit	unit	1	KT Ngudi Rahayu, Sendangsari, Putat Patuk
	c Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	1	KT Timbul Karya, Polaman, Pampang, Paliyan
	d Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	1	KT Ngudi Tani, Ngipik, Tegalrejo, Gedangsari
	e Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	1	KT Guyub, Kemorosari I, Piyaman, Wonosari
	f Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	1	KT Sedyo Manunggal, Jurangjero, Jurangjero, Ngawen
	g Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	1	KT Sri Dadi, Jambon, Hargomulyo, Gedangsari
	h Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	1	KT Sandang Pangan, Wonosobo, Banjarejo, Tanjungsari
	i Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	1	KT Ngudi Makmur, Nogosari II, Bandung, Playen

Pembangunan Dam Parit 2 unit menggunakan anggaran DAK Fisik Rp120.000.000,00 per unit, sedangkan untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 7 unit anggarannya Rp156.600.000,00 per unit. Keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilihat dari Intermediate Outcome yang dicapai tiap kelompok yang rata-rata tiap kelompok memiliki luas lahan pertanian yang terairi 10 ha per unit.



Realisasi fisik untuk kegiatan DAK bidang pertanian sumber air adalah : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal 100%; dan Pembangunan Dam Parit 100%.



Gambar 3.8. Beberapa Kegiatan DAK Pembangunan Dam Parit dan Sumur Dangkal

Untuk pembangunan DAK Pertanian yang menyangkut masyarakat digunakan model Swakelola. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat.

Tenaga Pendamping sebagai fasilitator pembangunan irigasi air tanah dangkal, pembangunan irigasi air tanah sedang, pembangunan irigasi air tanah dalam, pembangunan dam parit, bangunan rumah RMU, pembangunan lumbung pangan masyarakat, dan lantai jemur. Tenaga fasilitator diberikan honor dari dana penunjang DAK selama 4 bulan kerja atau sampai proses pembangunan selesai sesuai SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 60/KPTS/2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Teknis (Fasilitator) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Sarana Pertanian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan luas lahan 0,8 ha merupakan UPTD yang berfungsi sebagai tempat percontohan tanaman, UPTD Balai benih juga telah menjalin kerjasama dengan kelompok tani di sekitar lingkungan Kapanewon Karangmojo dan Kapanewon Ponjong dengan cara penyediaan benih bagi petani dan pembelian calon benih yang dihasilkan petani dibawah pengawasan BPSB Provinsi DI. Yogyakarta. Dalam tahun 2021, UPTD Balai benih mendapatkan target PAD Penjualan Hasil Usaha UPT Perbenihan sebesar Rp88.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp88.000.000,00 atau 100% yang diperoleh dari hasil produksi penangkaran benih padi musim hujan MH 1 dan MH 2 serta hasil opkup benih padi setelah diproses menjadi benih berlabel.



Dalam melaksanakan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tersebut dianggarkan sebesar Rp6.900.983.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp6.874.286.950,00 (99,61%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp26.696.050,00 (0,39%).

**Tabel 3.24
Anggaran dan Realisasi Program Sasaran 3**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Pengembangan Prasarana Pertanian	123.466.000	123.373.000	99,92	93.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	7.650.000	7.650.000	100,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	115.816.000	115.723.000	99,92	93.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian					
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.795.032.000	3.788.729.000	99,83	6.303.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi	255.635.000	255.635.000	100,00	-	



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	dan Pemeliharaan Dam Parit					
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2.726.850.000	2.706.549.950	99,26	20.300.050	
		6.900.983.000	6.874.286.950	99,61	26.696.050	0,39

Permasalahan:

1. Perubahan iklim
2. SDM petani yang umumnya berusia lanjut sehingga menghambat dalam adopsi teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
3. Infrastruktur di bidang pertanian yang perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam perencanaan program dan kegiatan
2. Pendampingan secara intensif kepada kelompok tani untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian.
3. Mengubah sistem pertanian tradisional menjadi pertanian yang modern berbasis mekanisasi pertanian agar sistem usaha tani lebih efisien.
4. Menerapkan sistem pemupukan berimbang dan optimalisasi tumpangsari.



Sasaran 4

“Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat”

Kabupaten Gunungkidul dalam pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura berfokus pada komoditas (prioritas nasional dan andalan daerah), fokus lokasi (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan *agro-ecological zone*) dan fokus dalam sistem agribisnis (mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang) dengan basis korporasi petani. Al ini sejalan dengan



Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional telah menetapkan Kabupaten Gunungkidul untuk Perkebunan dan Hortikultura sebagai kawasan untuk komoditas aneka cabai (cabai rawit dan cabai besar), bawang merah, mangga, pisang, durian, tebu, kakao dan kelapa untuk pengembangan dan perluasan kawasan serta pengembangan komoditas sesuai dengan potensi wilayah.

Salah satu Gerakan yang dicanangkan pemerintah pusat yang dilankan di Kabupaten Gunungkidul dalam mendorong produksi hortikultura adalah dengan program Gedor Horti atau Gerakan Mendorong Produksi, Meningkatkan Daya Saing dan Ramah Lingkungan Hortikultura. GEDOR Hortikultura diharapkan dapat menyentuh petani kecil, optimasi pemanfaatan lahan sempit dan pekarangan. GEDOR Hortikultura dilaksanakan menggunakan pendekatan pengembangan kawasan hortikultura yang berdaya saing melalui penggunaan benih bermutu, pendampingan budidaya, pengawalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Penguatan Kelembagaan Tani, Penyiapan Sarana Pascapanen, Pembentukan Pasar Tani/Pasar Lelang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pada sasaran 4 Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura selama 5 (lima) tahun adalah luas areal, produksi dan produktivitas pada komoditas kakao, mete, tembakau, kelapa, bawang merah dan cabe. Dari hasil evaluasi data pada tabel 3,25 terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 122,05% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Sasaran keempat tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat menunjukkan 5 komoditas unggulan dari kakao, mete, kelapa, bawang merah, dan cabe melampaui dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 kecuali untuk tembakau hanya 50,27%. (kategori sangat rendah). Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.25
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:								
	Kakao	Kg	492.433	520.000	555.147	106,76	Sangat tinggi	520.000	106,76
	Mete	Kg	939.476	634.600	453.545	71,47	tinggi	634.600	71,47
	Tembakau	Kg	259.469	541.950	169.700	31,31	Sangat Rendah	541.950	31,31



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
	Kelapa	Butir	36.136.603	25.158.062	30.218.226	120,11	Sangat tinggi	25.158.062	120,11
	Bawang Merah	Ton	743,23	484,75	1.738,11	358,56	Sangat tinggi	484,75	358,56
	Cabe	Ton	565,21	502,01	576,34	114,81	Sangat tinggi	502,01	114,81
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN						133,83	Sangat tinggi		133,83

Meningkatnya produksi pada beberapa komoditas perkebunan antara lain disebabkan oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/ benih bervariasi unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, pemberdayaan petani, pemeliharaan kebun induk, fasilitasi bibit/benih unggul, dan penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).



Untuk Tahun 2021 capaian realisasi tembakau sangat rendah dimana produksi turun selain karena adanya penurunan produktivitas dari 10,45 ku/ha (2020) menjadi 9,26 ku/ha (2021) atau ada penurunan sekitar 1.19 ku/ha. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) memperkirakan produksi tembakau turun sekitar 30% karena cuaca buruk dan kemarau basah yang mempengaruhi output, sehingga banyak tembakau yang secara kualitas tidak memenuhi standart. Produksi tembakau juga mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. keterbatasan modal, teknik pertanian tradisional yang tidak efisien, kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur pertanian, serta minimnya akses pasar secara langsung oleh petani sehingga keuntungan berkurang. Terdata pada tahun 2021 produksi tembakau turun sebesar 89.769 kg dari 169.700 kg dibandingkan tahun 2020 (259.469 kg). hal ini dipengaruhi juga oleh luas tanam yang pada tahun 2020 seluas 272,65 ha menjadi 183,20 ha di tahun 2021 atau ada penurunan luas tanam sebesar 89,45 ha yang dibarengi dengan penurunan luas tanaman menghasilkan yang pada tahun 2021 di angka 197,10ha yang berarti ada penurunan sebesar 108,55 ha dibandingkan tahun 2020.



Upaya-upaya yang ditempuh dalam pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pasca panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas. Tahun 2021 produksi kakao mencapai 555.147 kg yang meningkat 62,714 kg dibanding produksi tahun 2020 (492.433 kg).

Jambu mete merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, harganya cukup stabil dan prospek pasarnya baik. Penyebab fluktuasi produksi jambu mete disebabkan oleh ketidakterpaduan dan tidak adanya pola sinergisme dalam pengelolaan tanaman dan lahan serta keberadaan dan kinerja usahatani tidak didukung oleh keberadaan dan kinerja usaha-usaha terkait, baik di segmen rantai hulu yakni bidang usaha pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana usahatani; atau di segmen rantai hilir, yakni bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil usahatani; maupun di segmen rantai sisi, yakni bidang usaha jasa fasilitator, misalnya usaha pembiayaan dan infrastruktur penunjang. Dari target meter sebesar 634.600 kg terealisasi 453.545 kg atau 71,47%. Capaian ini masih masuk dalam kategori tinggi walaupun bila dibandingkan tahun 2020 (939.476 kg) ada penurunan sebesar 485.931 kg. Penurunan produksi ini juga dipengaruhi penurunan produktivitas dari 3,56 ku/ha menjadi 2,18 ku/ha di tahun 2021 atau ada penurunan sebesar 1.38 kh/ha.

Fluktuasi produksi kelapa sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari luas areal kelapa yang berkurang/bertambah atau dari jumlah tanaman yang menghasilkan. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun mendatang. Kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa antara lain: Peremajaan Tanaman Kelapa, pendampingan, dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kelompok petani kelapa, serta pemberdayaan kelembagaan. Target sebesar 25.158.062 butir kelapa di tahun 2021 terealisasi sebesar 36.136.603 butir atau 120,11%. Bila dibandingkan tahun 2020 ada penurunan produksi sebesar 5.918.377 butir.

Produksi hortikultura tahun 2021 yang masuk dalam sasaran 4 meliputi bawang merah dan cabe. Peningkatan capaian produksi hortikultura terlihat dari realisasi bawang merah sebesar 1.738,11 ton pada tahun 2021 dari target 484,78 ton atau sekitar 358,54%. Realisasi produksi bawang merah tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 994,88 ton. Terjadi kenaikan produksi karena dipengaruhi kenaikan provitas dari 78,56 ku/ha (2020) menjadi 85,40 ku/ha (2021) dikarenakan program pengembangan bawang merah dengan penambahan luas tanam bawang merah di tahun 2021. Luas tanam bawang merah pada tahun 2021 mencapai 144,83 ha atau meningkat 30 ha dibandingkan pada 2020 seluas 117 ha.



Petani di Gunungkidul mulai beralih dari tanaman palawija ke hortikultura, dengan alasan keuntungan yang didapat dengan bertani tanaman hortikultura, seperti bawang merah memang cukup menjanjikan dan harga jualnya juga tinggi.

Komoditas Cabe juga mengalami peningkatan produksi dari target 502,01 ton di tahun 2021 terelisasi sebesar 576,34 ton atau sebesar 114,81%. Bila dibandingkan tahun 2020, produksi cabe tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,13 ton. Produksi naik karena terjadi kenaikan produktivitas dari 29,10 ku/ha menjadi karena 34,96 ku/ha, hal ini disebabkan karena harga cabe cenderung turun akibat pandemi covid 19 sehingga tanaman kurang terawat. Biaya perawatan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kegiatan DAK bidang pertanian untuk pembangunan pembangunan irigasi air tanah sedang ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura. Lokasi hasil CPCL kelompok sebagai penerima pembangunan dam parit dan pembangunan irigasi air tanah sedang seperti yang tertera pada tabel 3.26 berikut ini

Tabel 3.26
Kelompok Penerima Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal
DAK Pertanian 2021

No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi
1	Pembangunan Sumber - Sumber Air			
	a Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Sedyo Maju, Pragak Semanu Semanu
	b Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Margo Dadi , Rejosari Serut Gedangsari
	c Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Ngudi Makmur 2 , Klayar Kedungpoh Nglipar
	d Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Maju Lestari , Ngimbang Watusigar Ngawen
	e Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KWT Sri Rejeki, Bedil Kulon Rejosari Semin
	f Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Ngudi Subur , Plembutan Barat Plembutan Playen
	g Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Rukun Inggang Murakapi, Tembesi Ponjong Ponjong
	h Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Sedyo Mulyo, Gondang Ngawis Karangmojo



No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi
i	Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Sidomulyo, Jambe Duwet Wonosari
j	Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang	unit	1	KT Karya Tani 2, Wareng I Wareng Wonosari

Pembangunan irigasi air tanah sedang sebanyak 10 unit anggarannya Rp156.600.000,00 per unit. Keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilihat dari Intermediate Outcome yang dicapai tiap kelompok yang rata-rata tiap kelompok memiliki luas lahan pertanian yang terairi 10 ha per unit. Realisasi fisik untuk kegiatan DAK bidang pertanian sumber air adalah : Pembangunan Irigasi Air Tanah sedang 100%.



Gambar 3.8. Beberapa Kegiatan DAK Pembangunan Dam Parit dan Sumur Sedang

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan program pengendalian bencana pertanian telah masuk kategori sangat berhasil. Dalam melaksanakan program dengan anggaran total Rp4.563.169.250,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp4.530.346.250,00 (99,28%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp32.823.000,00 (0,72%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.27
Anggaran dan Realisasi Program Sasaran 4

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sesuai dengan	53.209.750	53.209.750	100,00	-	



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi					
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.349.379.500	4.316.556.500	99,25	32.823.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	130.550.000	130.550.000	100,00	-	
		4.533.139.250	4.500.316.250	99	32.823.000	0,72
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	30.030.000	30.030.000	100,00	-	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	30.030.000	30.030.000	100,00	-	
		30.030.000	30.030.000	100,00	-	0,00

Permasalahan:

1. Belum adanya kontinuitas produksi perkebunan.
2. Masih terbatasnya penggunaan bibit unggul.
3. Makin berkurangnya areal tanam.
4. Pelaku usaha di bidang perkebunan masih kurang memahami jaminan mutu dan keamanan pangan.
5. Terbatasnya penyuluh perkebunan.

Solusi:

1. Melakukan penataan pola tanam.
2. Mendorong petani menggunakan bibit unggul.
3. Mendorong pemberdayaan kelembagaan petani.



4. Pelayanan teknis (pembinaan/pendampingan) dalam budidaya dan pengolahan hasil industry kehutanan dan perkebunan.
5. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pemasaran hasil perkebunan/hortikultura.
6. Meningkatkan dukungan penyuluh perkebunan.



Sasaran 5

“Produksi Komoditas Peternakan Meningkatkan”

Kontribusi Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah sentra ternak di DI Yogyakarta memiliki peran yang besar dalam masyarakat. Kabupaten Gunungkidul didalam menentukan arah pengembangan ternak berusaha melaksanakan secara efisien, produktif, kompetitif dan ramah lingkungan sehingga perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama adalah kondisi real peternakan di Kabupaten Gunungkidul. Kedua, konsep dasar yang berpihak kepada kelestarian lingkungan dan pemanfaatan potensi setempat secara maksimal dengan proses *recycle*. Ketiga, bentuk kerjasama dengan kelompok calon mitra atau target grup

Pembangunan sub sektor peternakan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan populasi maupun produksi ternak dan hasil ikutannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan pasar untuk mencapai kedaulatan pangan. Pengembangan peternakan ini meliputi efisiensi dan efektivitas pelayanan teknis seperti Inseminasi Buatan (IB), Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) pakan, bibit dan pelayanan ekonomis seperti pasar, tempat pemotongan hewan (TPH), tempat pemotongan unggas (TPU), perkreditan/permodalan, sarana dan tenaga.

Target meningkatnya produksi komoditas unggulan peternakan merupakan kegiatan peningkatan produksi ternak terutama produksi daging dan telur. Produksi daging terutama diperoleh dari hasil pemotongan ternak besar, ternak kecil dan unggas. Sedangkan produksi telur dihitung dari jumlah populasi ternak unggas dan jumlah persentase betina produktif.

Capaian sasaran 5 tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.28
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Jumlah Populasi ternak dan Produksi telur dan daging								
	Sapi Potong	Ekor	154.423	152.526	161.655	105,99	Sangat tinggi	152.526	105,99
	Kambing	Ekor	199.147	197.557	206.789	104,67	Sangat tinggi	197.557	104,67
	Ayam Buras	Ekor	1.128.362	1.196.808	1.109.455	92,70	Sangat tinggi	1.196.808	92,70
	Produksi daging	Kg	3.581.061	4.618.751	4.357.430	94,34	Sangat tinggi	4.618.751	94,34
	Produksi telur	Kg	3.347.297	3.385.232	3.654.136	107,94	Sangat tinggi	3.385.232	107,94
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN						101,13	Sangat tinggi		101,13

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 101,13% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Sasaran kelima tingkat produksi komoditas peternakan unggulan meningkat pada indikator memuat capaian realisasi populasi dari sapi potong 161.655 ekor atau naik sebesar 7.232 ekor dari tahun 2020 (154.423 ekor). Capaian kambing 206.789 melebihi dari target sebesar 197.557 ekor atau capaian sebesar 104,67%. Target ayam buras 1.196.808 ekor tercapai 1.109.455 ekor atau menurun sebesar 18.907 ekor Capaian populasi bila dibandingkan tahun 2020.

Meningkatnya produksi ternak selain ditentukan oleh jumlah pemotongan tentunya juga dipengaruhi jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Naik turunnya populasi ternak seperti sapi potong, kambing, domba, dan unggas juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti jumlah kelahiran ternak, kematian ternak, pemotongan ternak, serta jumlah ternak masuk dan ternak keluar. Sedangkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tingkat populasi ini adalah pemotongan ternak dan Inseminasi Buatan.

Setelah berhasil meluncurkan program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab), Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu dengan program Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

Program utama dalam program SIKOMANDAN ini yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB). Program utama tersebut merupakan upaya



penerapan sistem manajemen reproduksi yang baik meliputi: pemeriksaan status reproduksi dan gangrep (gangguan reproduksi), pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 Cair, pengendalian betina produktif, dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. Kegiatan ini terintegrasi menggunakan pendekatan peran aktif masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan. Dengan SIKOMANDAN diharapkan produksi ternak sapi terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.29
Pencapaian SIKOMANDAN 2021

kapanewon	akseptor	ib	pkb			lahir		
			negatif	bunting	jml	jantan	betina	jml
Gedang Sari	1.524	1.991	264	421	685	288	276	564
Girisubo	573	813	112	343	455	206	256	462
Karangmojo	2.850	3.797	504	1.071	1.575	650	786	1.436
Ngawen	1.778	2.157	424	805	1.229	359	549	908
Nglipar	2.293	3.046	457	1.153	1.610	582	668	1.250
Paliyan	1.578	1.942	281	664	945	365	361	726
Panggang	1.235	1.666	86	239	325	252	290	542
Patuk	2.497	3.355	715	506	1.221	607	389	996
Playen	2.499	3.182	437	1.065	1.502	744	734	1.478
Ponjong	4.516	5.823	961	1.357	2.318	1.271	1.025	2.296
Purwosari	1.592	2.135	124	461	585	285	479	764
Rongkop	692	997	188	367	555	248	217	465
Sapto Sari	3.127	4.228	338	1.298	1.636	724	1.235	1.959
Semanu	2.829	3.415	515	1.747	2.262	795	822	1.617
Semin	1.978	2.323	298	924	1.222	433	571	1.004
Tanjungsari	2.277	3.031	419	598	1.017	625	688	1.313
Tepus	1.925	2.568	387	625	1.012	659	759	1.418
Wonosari	2.219	2.652	434	1.098	1.532	461	790	1.251
JUMLAH	37.982	49.121	6.944	14.742	21.686	9.554	10.895	20.449

Program SIKOMANDAN ini memiliki tujuan mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging sapi yang ditargetkan tercapai pada 2026 dan mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Hewan sebagai unsur pelaksana teknis mempunyai tugas penyelidikan, diagnostik dan pemeriksaan terhadap bahan asal hewan. Kegiatan ini untuk mendukung sasaran dari Bidang Peternakan yaitu meningkatkan populasi ternak. Pengawasan atas mutu bahan/pangan asal hewan serta kegiatan surveilans penyakit menular



strategis/zoonosis dilakukan dengan pengambilan sampel bahan asal hewan dan sampel specimen hewan seperti tanah, feces, dan darah.

Selain UPT lab Keswan, Dinas Pertanian dan Pangan juga memiliki 11 Pusat Kesehatan Hewan, yang terdiri dari 6 UPT Puskesmas yang telah definitif dan 5 Puskesmas. Peran petugas di tingkat kecamatan melalui UPT Puskesmas juga sangat besar. Mulai dari kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak, pelayanan IB, kegiatan sosialisasi hingga praktek pembuatan pakan dan pupuk. 5 UPT Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul yaitu UPT Puskesmas Nglipar, UPT Puskesmas Karangmojo, UPT Puskesmas Semanu, UPT Puskesmas Wonosari, UPT Puskesmas Playen dan UPT Puskesmas Panggang yang masing-masing memiliki 3 kecamatan sebagai wilayah kerja dalam pelayanan kesehatan hewan dan peternakan.

Tingginya permintaan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim keluar daerah untuk komoditas unggas komersil didukung dengan keberadaan pembibitan unggas komersil di Kabupaten Gunungkidul. Perusahaan yang secara rutin melakukan pemeriksaan unggas (DOC) sebelum dikirim keluar daerah. Perusahaan yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang bergerak dalam bidang peternakan seperti yang tertara pada tabel 3.30 di bawah ini.

Tabel 3.30
Perusahaan Peternakan di Kabupaten Gunungkidul

PERUSAHAAN	JENIS	LOKASI	PERIJINAN
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK	Breeding Parent Stok	Tonggor, Semanu	Berijin
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK	Breeding Grand Parent Stok	Beji, Ngawen	Proses Pengajuan
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK	Hatchery	Kwangen , Semanu	Berijin
PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK	Breeding Parent Stok	Kalitekuk, Karangmojo	Proses Pengajuan
PT MALINDO FEEDMIL TBK	Breeding Parem Stok	Semanu	Berijin
PT MALINDO FEEDMIL TBK	Hatchery	Semanu	Berijin
PT CHAROEN POKPHAN INDONESIA	Hatchery	Semanu	Berijin
PT MALON INDONESIA	Rumah Potong Unggas	Patuk	Blm
PT MUSTIKA	Kemitraan Ayam Broiler	All	
PT SENTRA GEMILANG MULIA	Kemitraan Pullet	Tanjungsari	
PT SIDO RAHAYU	Peternakan Petelur	Semanu	Berijin
PT UMI	Kemitraan Ayam Broiler	All	
PT JANU PUTRA SEJAHTERA	Hatchery	Karangmojo	Berijin
PT JANU PUTRA SEJAHTERA	Breeding	Wonosari	Berijin
PT JANU PUTRA SEJAHTERA	Breeding	Karangmojo	Berijin
PT DEWATA ANUGRAH INDAH	Exportir Guano	Ponjong	
PT SUP	Kemitraan Ayam Broiler	All	



Hasil evaluasi sasaran 5, pada indikator kinerja untuk produksi daging mengalami kenaikan sebesar 776.369 kg dari tahun 2020 sebesar 3.347.297 kg menjadi 4.357.430 kg di tahun 2021. Perhitungan produksi daging diperoleh dari penjumlahan hasil pemotongan beberapa komoditas ternak mulai ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing, domba, kelinci) dan unggas (ayam pedaging, ayam buras, ayam petelur afkir, puyuh dan itik). Jumlah pemotongan dari semua komoditas ternak ini baik yang merupakan pemotongan ternak tercatat atau tidak tercatat memberikan kontribusi terhadap realisasi capaian produksi daging.

Produksi telur juga mengalami kenaikan dari capaian 2020 sebesar 3.347.297 kg naik sebesar 306.869 kg menjadi 3.654.136 kg di tahun 2021. Sebagai parameter perhitungan produksi telur digunakan angka persentase betina produktif untuk ayam buras sebesar 35% dari keseluruhan populasi ayam buras, ras petelur sebesar 60%, itik sebesar 60% dan puyuh memiliki parameter betina produktif sebesar 60%.

Kondisi pencapaian angka produksi ternak yang positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan kontribusi dari kelompok ternak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Pencapaian target sasaran tersebut didukung selain oleh masih banyaknya masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama, juga didukung oleh masih tersedianya lahan untuk bertani dan beternak.

Kegiatan lainnya untuk mendukung peningkatan populasi adalah dengan melaksanakan kegiatan penanganan gangguan reproduksi dan kegiatan perbibitan sapi. Untuk kegiatan perbibitan, pelaksanaan kegiatan berdasarkan Keputusan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/KPTS/PD.410/1/2015 yang telah menetapkan Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu kawasan sapi potong nasional. Kegiatan pendukung lainnya adalah dengan memberikan bantuan premi asuransi usaha ternak sapi sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/KPTS/SR.230/B/06/2016.

Dalam melaksanakan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tersebut dianggarkan sebesar Rp638.024.675,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp624.446.000,00 (98%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp13.578.675,00 (2,13%), yang dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.31
Anggaran dan Realisasi Program Sasaran 5

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	144.430.000	138.467.500	95,87	5.962.500	
		144.430.000	138.467.500	95,87	5.962.500	4,13
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota					
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	146.759.850	146.692.175	99,95	67.675	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Pelayanan Jasa	61.955.000	54.496.500	87,96	7.458.500	



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Laboratorium					
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	253.299.825	253.209.825	99,96	90.000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	31.580.000	31.580.000	100,00	-	
		493.594.675	485.978.500	98,46	7.616.175	1,54

Permasalahan:

1. Pola usaha peternakan masih dengan pola tradisional.
2. Sumber permodalan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak.
3. Penerapan teknologi peternakan masih terbatas.

Solusi :

1. Pendampingan secara intensif kepada kelompok ternak untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi peternakannya.
2. Optimalisasi permodalan.
3. Menumbuhkan minat pemuda untuk bekerja dan berwirausaha di bidang peternakan.



Sasaran 6

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 menjadi capaian tahun dasar, karena Dinas Pertanian dan Pangan mulai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Capaian untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 79,73. Dari target yang ditetapkan sebesar 80 sehingga realisasi kinerjanya 99,66% masuk kategori sangat tinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dengan melakukan survey di dasarkan pada 9 indikator unsur pelayanan yaitu (U1) persyaratan, (U2) system, mekanisme dan prosedur, (3) waktu penyelesaian pelayanan, (U4) biaya/tariff, (U5) produk spesifikasi jenis layanan, (U6) kompetensi pelaksana, (U7) perilaku pelaksana, (U8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, (U9) sarana dan prasarana. Untuk mengetahui capaian program selengkapny dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.32

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap p2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80,58	80	79,73	99,66	Sangat tinggi	80	99,66
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					99,66			

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tahun 2021 sasaran survey kepuasan masyarakat di Dinas Pertanian dan Pangan adalah pengguna jasa layanan baik secara administrasi seperti permohonan pendaftaran kelompok, pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian.



Sasaran 7

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% masuk kategori sangat tinggi.

Tahun 2021, indikator laporan keuangan disusun tepat waktu ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan. yang disusun laporan keuangannya meliputi laporan bulanan sebanyak 12 laporan, laporan semesteran 1 laporan dan laporan tahunan 1 laporan, Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.33

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,00			

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan DPPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/002/2021 tanggal 8 November 2021 dengan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran terdiri dari anggaran pendapatan asli daerah, anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebagai berikut:



Tabel 3.34
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	298.000.000,00	433.000.000,00	135.000.000,00	45,30
7.	PENDAPATAN DAERAH	298.000.000,00	433.000.000,00	135.000.000,00	45,30
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	298.000.000,00	433.000.000,00	135.000.000,00	45,30
4.1.02.	Retribusi Daerah	298.000.000,00	433.000.000,00	135.000.000,00	45,30
	Jumlah Pendapatan	298.000.000,00	433.000.000,00	135.000.000,00	45,30
8.	BEBAN DAERAH	40.299.169.552,00	37.214.401.017,00	(3.084.768.535,00)	(7,65)
5.	BELANJA DAERAH	40.299.169.552,00	37.214.401.017,00	(3.084.768.535,00)	(7,65)
5.1.	BELANJA OPERASI	37.698.169.552,00	34.613.401.017,00	(3.084.768.535,00)	(8,18)
5.1.01.	Belanja Pegawai	22.677.690.052,00	20.813.032.592,00	(1.864.657.460,00)	(8,22)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.445.000,00	8.036.924.925,00	(588.520.075,00)	(6,82)
5.1.05.	Belanja Hibah	6.395.034.500,00	5.763.443.500,00	(631.591.000,00)	(9,88)
5.2.	BELANJA MODAL	2.601.000.000,00	2.601.000.000,00	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	891.000.000,00	891.000.000,00	-	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja	40.299.169.552,00	37.214.401.017,00	(3.084.768.535,00)	(7,65)
	Surplus/(Defisit)	(40.001.169.552,00)	(36.781.401.017,00)	3.219.768.535,00	(8,05)



Sasaran 8

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu dari 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2020 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 3.35
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,00			

Tahun 2021 program yang dilaksanakan untuk menjalankan sasaran 6,7 dan 8 adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp66.041.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp66.026.000,00 (99,98%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp15.000,00 (0,02%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.37
Anggaran dan Realisasi Program Sasaran 6,7 dan 8

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.950.000	15.950.000	100	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.950.000	7.950.000	100	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	100	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.500.000	1.500.000	100	-	



**Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	100	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	100	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	500.000	100	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.041.000	48.026.000	99,97	15.000	0,03
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.950.000	3.950.000	100	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44.091.000	44.076.000	99,97	15.000	0,03
	Penataan Organisasi	2.050.000	2.050.000	100	-	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.050.000	2.050.000	100	-	
		66.041.000	66.026.000	99,98	15.000	0,02

Permasalahan:

1. Berkurangnya pegawai /personil karena adanya mutasi/alih tugas/pensiun,
2. Ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip belum maksimal



Solusi:

1. Pemutakhiran data base kepegawaian
2. Pelatihan kearsipan, kepegawaian, barang jasa, dan perencanaan

E. Penghargaan



Dalam rangka memperingati Hari Kakao Indonesia 2021, Dewan Kakao Indonesia memberikan penghargaan kepada para petani dan pelaku usaha kakao di daerah yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan kebun kakao serta UMKM pengelolaan agribisnis kakao.

Berdasarkan hasil penilaian tim penilai dari Ketua Dewan Kakao Indonesia, Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao Indonesia (APIKCI), Ketua Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), dan Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI), maka ditetapkan penerima penghargaan Pejuang Kakao Indonesia Tahun 2021 di DIY yaitu:



1. Karmadi sebagai Petani Pejuang Kakao Indonesia di DIY. Beliau merupakan penggiat, motivator dan percontohan petani kakao di Gunungkidul yang memiliki keahlian di bidang rehabilitasi tanaman kakao melalui sambung samping/side grafting.
2. Suhartini sebagai UMKM Coklat Pejuang Kakao Indonesia di DIY. Beliau merupakan ketua KWT di Gunungkidul yang memelopori, memotivasi serta mandampingi para anggotanya belajar mengolah kakao fermentasi menjadi berbagai makanan olahan berbahan dasar coklat.

Penghargaan ini diharapkan dapat menambah motivasi petani kakao untuk terus mengelola kebun kakao dan mengembangkan UMKM kakao, sebagai percontohan bagi petani kakao dan UMKM lainnya serta siap mendampingi dinas sebagai fasilitator.



F. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 93,02% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 92,88%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,89%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran keenam dan kedelapan (100%). Sedangkan penyerapan terendah pada program/kegiatan di sasaran ketujuh, pada indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat (88,79%).

Belanja langsung urusan dari target sebesar Rp14.917.538.425,00 terealisasi sebesar Rp14.710.910.960,00 atau ada efisiensi Rp206.627.465,00 atau sebesar 1,39%. Untuk Belanja pendukung dari target Rp22.294.862.592,00 terealisasi Rp19.895.538.134,00 atau ada efisiensi sebesar Rp2.399.324.458,00 (10,76%). Program kegiatan dengan efisiensi terbesar pada Kesejahteraan masyarakat petani meningkat dengan efisiensi sebesar Rp122.088.240,00 (7,70%) dari anggaran yang telah ditargetkan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel 3.38 berikut ini:

Tabel 3.38
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Tahun 2021

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	1.584.815.500	1.462.727.260	92,30	122.088.240	7,70
2	Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi Pangan Meningkat	1.164.505.000	1.153.078.500	99,02	11.426.500	0,98
3	Produksi Tanaman Pangan Meningkat	6.900.983.000	6.874.286.950	99,61	26.696.050	0,39
4	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	4.563.169.250	4.530.346.250	99,28	32.823.000	0,72
5	Produksi Komoditas Peternakan Meningkat	638.024.675	624.446.000	97,87	13.578.675	2,13
6	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan	2.050.000	2.050.000	100,00	0	0,00



**Laporan Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	pelayanan publik meningkat					
7	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	48.041.000	48.026.000	99,97	15.000	0,03
8	Kesesuaian program dokumen perencanaan daerah	15.950.000	15.950.000	100,00	0	0,00
Jumlah belanja langsung urusan		14.917.538.425	14.710.910.960	98,61	206.627.465	1,39
Jumlah belanja pendukung		22.294.862.592	19.895.538.134	89,24	2.399.324.458	10,76
total belanja langsung		37.212.401.017	34.606.449.094	93,00	2.605.951.923	7,00

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Keuangan DPP Tahun 2021



BAB IV

PENUTUP

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena dari 5 (lima) sasaran yang ditetapkan 5 (lima) dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan dimana petani seringkali dalam posisi tawar yang lemah dan harus berhadapan dengan industri pangan skala besar yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.



Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

ꦧꦶꦏꦸꦤꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦂꦠꦤꦶꦤꦺꦤ꧀ꦢꦤꦥꦁꦏꦸꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul KodePos 55812

Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317

Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. KRISNA BERLIAN

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 8 November 2021

Pihak Kesatu,



drh. KRISNA BERLIAN



Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2021**

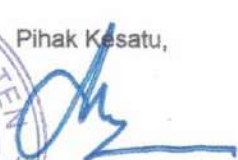
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk		
		Pendapatan sektor pertanian	(dalam juta)	
		padi	Rp/ha	20,77
		jagung	Rp/ha	16,75
		kedelai	Rp/ha	8,50
		kakao	Rp/ha	28,08
		kelapa	Rp/ha	36,76
		mete	Rp/ha	23,15
		tembakau	Rp/ha	76,58
		bawang merah	Rp/ha	175,03
		cabe besar	Rp/ha	67,14
		pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC)	Rp (ekor)	34.667
		Hasil ternak /daging sapi, kambing, dan ayam	Rp (kg)	270.683
		Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu	kelompok	117
2	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat	Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:		
		1) Ketersediaan Pangan (Beras)	ton	125.111,00
		2) Harga pangan yang terjangkau dan terkendali		
		Beras IR I	Rp	10.815
		Beras IR II	Rp	9.810
		Jagung Pipil Kering	Rp	5.250
		Kedelai Lokal	Rp	8.400
		3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)		89,2
		4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)		91
3	Produksi Tanaman Pangan Meningkat	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan :		
		Padi	ton	291.572
		Jagung	ton	208.500
		Kedelai	ton	7.000
		Ubi Kayu	ton	882.908
4	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:		
		Kakao	Kg	520.000
		Mete	Kg	634.600
		Tembakau	Kg	541.950
		Kelapa	butir	25.158.062

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
		Bawang Merah	ton	484,78
		Cabe	ton	502,01
5	Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat	Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur		
		Sapi Potong	Ekor	152.526
		Kambing	Ekor	197.557
		Ayam Buras	Ekor	1.196.808
		Produksi daging	Kg	4.618.751
		Produksi telur	Kg	3.385.232

N0.	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMENDIRIAN PANGAN	562.105.000,00	DAU/ DAK
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.122.055.500,00	DAU
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.000.000,00	DAU
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	548.425.000,00	DAU
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.677.569.250,00	DAU/DBH-CHT
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.900.983.000,00	DAU/DBH-CHT
7.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	493.594.675,00	DAU
8.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.030.000,00	DAU
9.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	514.735.000,00	DAU/ DAK

Pihak Kedua, 

H. SUNARYANTA

Wonosari, 8 November 2021
Pihak Kesatu,


drh. KRISNA BERLIAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
: 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)		
		Pendapatan sektor pertanian	(dalam juta)	
		padi	Rp/ha	20,77
		jagung	Rp/ha	16,75
		kedelai	Rp/ha	8,50
		kakao	Rp/ha	28,08
		kelapa	Rp/ha	36,76
		mete	Rp/ha	23,15
		tembakau	Rp/ha	76,58
		bawang merah	Rp/ha	175,03
		cabe besar	Rp/ha	67,14
		pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC)	Rp (ekor)	34.667
		Hasil ternak /daging sapi, kambing, dan ayam	Rp (kg)	270.683
		Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis	kelompok	117
2	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat	Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:		
		1) Ketersediaan Pangan (Beras)	ton	125.111,00
		2) Harga pangan yang terjangkau dan terkendali		
		Beras IR I	Rp	10.815
		Beras IR II	Rp	9.810
		Jagung Pipil Kering	Rp	5.250
		Kedelai Lokal	Rp	8.400
		3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)		89,2
		4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)		91
3	Produksi Tanaman Pangan Meningkat	Tingkat produksi komoditas unggulan tanaman pangan :		
		Padi	ton	291.572
		Jagung	ton	208.500
		Kedelai	ton	7.000
		Ubi Kayu	ton	882.908
4	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan:		
		Kakao	Kg	520.000
		Mete	Kg	634.600
		Tembakau	Kg	541.950
		Kelapa	butir	25.158.062
		Bawang Merah	ton	484,78
		Cabe	ton	502,01
5	Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat	Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur		
		Sapi Potong	Ekor	152.526
		Kambing	Ekor	197.557
		Ayam Buras	Ekor	1.196.808
		Produksi daging	Kg	4.618.751
		Produksi telur	Kg	3.385.232



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 29 Maret 2021

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul
di -

WONOSARI

Nomor : 700/17/EU-LKJIP/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) pada
Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2020.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dengan tujuan:
 - a) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - b) Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatanakuntabilitas instansi;
- d) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020, dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018, serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 menunjukkan kategori BB dengan nilai sebesar 77,21 (*tujuh puluh tujuh koma dua puluh satu*). Kondisi ini berarti Akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4. Nilai sebagaimana tersebut pada poin 3, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,24
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,63
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,34
4	Evaluasi Internal	10%	6,92
5	Pencapaian Kinerja	20%	12,08
	JUMLAH	100%	77,21

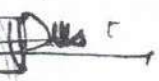
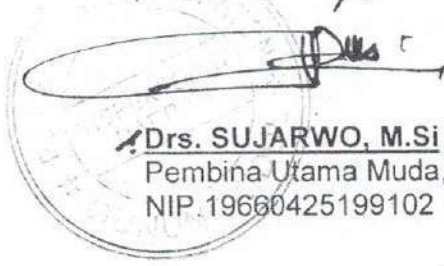
5. Uraian hasil Evaluasi dan rekomendasi terlampir.

Perpres 29/2014
Ttg AKIP

di perlukan y/ untuk efektifitas
pengukuran apun dan berorientasi ke.

y/ pengisian lap kinerja
dilak oleh dg dan dalam
tindakan penguatan
& ev pada Cmb

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR, 

Drs. SUJARWO, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19660425199102 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Gunungkidul

HASIL EVALUASI LKjIP
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Kondisi	Rekomendasi
1	PERENCANAAN KINERJA	
	Dokumen Renstra SKPD belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan. Tujuan, sasaran, indikator dan target-target kinerja dalam Renstra belum mengacu pada tugas dan fungsi, <i>core bussiness</i> , isu strategis yang berkembang, hubungan kausalitas dan praktik-praktik terbaik.	Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan agar melakukan perbaikan atas penetapan Indikator Kinerja Sasaran agar mengacu pada tugas dan fungsi, <i>core bussiness</i> , isu strategis yang berkembang, hubungan kausalitas dan praktik-praktik terbaik.
2	PENGUKURAN KINERJA	
	--	--
3	LAPORAN KINERJA	
	Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan, pelaksanaan dan penilaian kinerja.	Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan agar menggunakan informasi kinerja digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, peningkatan dan penilaian kinerja.
4	EVALUASI INTERNAL	
	--	--
5	PENCAPAIAN KINERJA	
	--	--

**LAMPIRAN II : LEMBAR KERJA EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		REF
		A	NILAI	
1	2	5	6,00	8
		87,46%	26,24	
		88,08%	8,81	
		9,00	2,00	
		Y	1,00	
		A	1,00	
		A	1,00	
		Y	1,00	
		0,79	3,96	
		A	1,00	100,00%
		B	0,75	
		A	1,00	100,00%
		B	0,75	
		B	0,75	
		C	0,50	
		0,95	2,85	
		A	1,00	
		A	1,00	
		A	1,00	
		B	0,75	
		A	1,00	
		87,14%	17,43	
		1,00	4,00	
		Y	1,00	
		A	1,00	
		Y	1,00	
		Y	1,00	
		A	1,00	
		A	1,00	
		Y	1,00	
		0,89	8,93	
		A	1,00	100,00%
		A	1,00	
		A	1,00	100,00%
		B	0,75	
		B	0,75	
		B	0,75	
		Y	1,00	
		0,75	4,50	
		B	0,75	
		A	1,00	
		C	0,50	
		Y	1,00	
		C	0,50	

20	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	B	0,75	
21	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada	B	0,75	
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		82,50%	20,63	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		0,88	4,38	
1	Telah terdapat indikator kinerja-utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1,00	
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	B	0,75	
3	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	B	0,75	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y	1,00	
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		0,85	10,63	
5	IKU telah dapat diukur secara obyektif (measurable)	A	1,00	100,00%
6	IKU telah berorientasi (menggambarkan) hasil	B	0,75	90,00%
7	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	A	1,00	100,00%
8	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	B	0,75	90,00%
9	IKU telah diukur realisasinya	A	1,00	100,00%
10	IKU SKPD telah selaras dengan IKU Pemda	B	0,75	
11	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,75	
12	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	B	0,75	
13	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif (measurable)	A	1,00	100,00%
14	Indikator kinerja sasaran telah berorientasi (menggambarkan) hasil	B	0,75	90,00%
15	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	A	1,00	100,00%
16	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	B	0,75	90,00%
17	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	A	1,00	100,00%
18	Indikator kinerja sasaran SKPD telah selaras dengan indikator kinerja Pemda	B	0,75	
19	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0,75	
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		0,75	5,63	
20	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0,75	
21	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0,75	
22	IKU telah direviu secara berkala	B	0,75	
23	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	B	0,75	
24	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	B	0,75	
25	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan	B	0,75	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		75,63%	11,34	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		1,00	3,00	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD telah disusun	A	1,00	
2	LKj IP SKPD telah disampaikan tepat waktu	Y	1,00	
3	LKj IP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	A	1,00	
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		0,81	6,09	
4	LKj IP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya	B	0,75	
5	LKj IP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	B	0,75	
6	LKj IP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A	1,00	
7	LKj IP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0,75	
8	LKj IP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	A	1,00	
9	LKj IP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	A	1,00	
10	Informasi kinerja dalam LKj IP dapat diandalkan	B	0,75	
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	B	0,50	
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		0,50	2,25	
12	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	C	0,50	
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	C	0,50	
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	C	0,50	
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	C	0,50	
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		69,17%	6,92	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		0,83	1,67	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	B	0,75	
2	Evaluasi Program telah dilakukan	B	0,75	
3	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang	Y	1,00	
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		0,60	3,00	

4	Evaluasi program dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi	B	0,50	
5	Pelaksanaan evaluasi program telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan	B	0,75	
6	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0,75	
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,50	
8	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat	B	0,50	
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		0,75	2,25	
9	Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan	B	0,75	
10	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja	B	0,75	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		60,42%	12,08	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)		0,67	3,33	
1	Target dapat dicapai	B	0,75	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	0,75	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	0,50	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%)		0,75	3,75	
4	Target dapat dicapai	B	0,75	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	0,75	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	0,75	
KINERJA YANG DILAPORKAN (IKU) (5%)		0,50	2,50	
7	Target dapat dicapai	B	0,50	
8	Kesesuaian antara indikator kinerja yang dilaporkan dengan Indikator Kinerja Utama yang diukur oleh Inspektorat	B	0,50	
9	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	0,50	
KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER (5%)		0,50	2,50	
10	Kinerja berdasarkan Penilaian TPP	B	0,50	
11	Kinerja berdasarkan Evaluasi LKj IP Pemda DIY	B	0,50	
12	Kinerja berdasarkan Laporan Keuangan Daerah	B	0,50	
13	Kinerja/Penghargaan Lainnya	C	0,50	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		77,21%	77,21	BB



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wijaya Bhakti

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul Kode Pos 55812

Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317

Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

**TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT
EVALUASI LKjIP TAHUN SEBELUMNYA**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Surat Inspektur Daerah Nomor 700/17/ Ev-LKJIP/ 2021 Tanggal 29 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Pada tahun anggaran berikutnya diharapkan melakukan tindakan perbaikan yang lebih optimal terutama terkait dengan:	Sebagai pengampu urusan pertanian dan urusan pangan di Kabupaten Gunungkidul saat ini, Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1	Melakukan Perbaikan atas penetapan indikator kinerja. Sasaran agar mengacu pada tugas dan fungsi, <i>core business</i> , isu strategis yang berkembang, hubungan kausalitas dan praktik-praktik terbaik.	1. Tindak lanjut terkait Dokumen Renstra SKPD belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan, Dinas Pertanian dan Pangan sudah melakukan koordinasi dengan Bappeda berdasarkan data yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Tindak lanjut juga telah dilakukan Perubahan Nomenklatur, dimana telah dilakukan beberapa penyesuaian baik penggabungan, pemindahan dan penghapusan terhadap program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan, sasaran, indikator dan targetnya yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050=3708 Tahun 2020. Dinas Pertanian dan Pangan juga melakukan pencermatan dengan menyusun <i>core business</i> sesuai arahan dari bagian organisasi untuk tiap bidang / UPT untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih baik
2	Menggunakan informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan pelaksanaan dan penilaian kinerja	2. Telah dilakukan sesuai hasil evaluasi kinerja secara triwulan . Sedangkan terkait penilaian kinerja, Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan survey kepuasan masyarakat sesuai

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan hasil SKM sebesar 80,58 kriteria mutu pelayanan B dan kinerja : Baik

KEPALA,



Ir. BAMBANG WISNU BROTO
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19610921 198903 1 007

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2021

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ketahanan Pangan Meningkat	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meningkat	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			1,55	7.820.000	98,09	495.965.000	0,29	1.470.000	0,07	350.000	
					1) Ketersediaan Beras (Pangan Pokok)	125.111 ton							125.111		
					2) Harga pangan yang terjangkau dan terkendali										
					1. Beras IR I	10.815 Rp							10.815		
					2. Beras IR II	9.810 Rp							9.810		
					3. Jagung Pipil Kering	5.250 Rp							5.250		
					4. Kedelai Lokal	8.400 Rp							8.400		
					3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	89,2									
					4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	91									
			2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
			01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Pembangunan lumbung pangan (DAK)	1 unit		5.265.000		149.460.000		280.000		-	
			02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Pembangunan lantai jemur (DAK)	100 m2		1.680.000		40.630.000		490.000		-	
			03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pembangunan rumah RMU (DAK)	1 unit		875.000		305.875.000		700.000		350.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					Pelaksanaan Analisis usaha tani	4 laporan									
			05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pelatihan dan pendampingan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)	1 angkatan		3.385.000		2.155.000		2.340.000		120.000	
					Jumlah Pelatihan manajemen lumbung pangan desa	2 angkatan									
					Jumlah Pelatihan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	2 angkatan									
					Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	2 angkatan									
			2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota											
			03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan beras cadangan pangan pemerintah	6 ton		-		60.000.000		-		-	
			2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
			01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Analisis Pola Konsumsi Pangan (PPH)	1 dokumen		-		-		1.000.000		1.000.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					KRPL desa lama pasca covid	10 paket									
					Pendampingan Pekarangan Pangan Lestari/P2L (DAK Non Fisik)	7 kelompok									
					Penyelenggaraan pasar tani	48 kali									
					Penyelenggaraan temu usaha/kemitraan	1 kali									
					Sosialisasi konsumsi pangan lokal karbohidrat non karbohidrat (komoditas minor)	3 kali									
3	Ketahanan Pangan Meningkat	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meningkat	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			56,13	2.245.000	11,13	445.000	25,88	1.035.000	7	275.000	
			2,02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	4 kali		2.245.000		445.000		1.035.000		275.000	
					Pelatihan desa mandiri pangan	4 kali									
4	Ketahanan Pangan Meningkat	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meningkat	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			31,77	212.460.000	37,53	250.980.000	30,68	205.160.000	0,01	100.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
			05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen		-		-		-		500.000	
					Jumlah Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen									
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat	2.09.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu			5.783.264.732		7.523.934.286		5.272.326.662		4.146.155.372	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan		5.770.633.732		7.512.104.286		5.259.361.662		4.134.490.372	
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen		2.900.000		700.000		700.000		700.000	
					jumlah dokumen LRA	1 dokumen									
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran dan dokumen LRA	14 laporan		9.731.000		11.130.000		12.265.000		10.965.000	
					Jumlah Laporan Prognosis (2 semester)	2 laporan									
		Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraa n pelayanan perangkat daerah meningkat	2.09.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas			1.000.000		800.000		600.000		1.020.000	
			03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	171 ASN		1.000.000		800.000		600.000		1.020.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					Jumlah kendaraan roda dua yang terpelihara (servis dan BBM)	1 LS									
					Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara (servis dan BBM)	1 LS									
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi (printer, mesin fax, LCD Proyektor, dll	1 LS		1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehab eternit di gedung dinas pertanian dan pangan, UPT dan BPP	1 LS		-		10.000.000		-		-	
					rehab grendel di ruang dinas pertanian dan pangan, UPT dan BPP	1 LS									
					rehab slot pintu di ruangan dinas pertanian dan pangan, UPT dan BPP	1 LS									
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terfasilitasi (AC, kipas angin, pompa air, LED monitor)	1 LS		-		2.500.000		-		2.500.000	
			2.13	Penataan Organisasi											
			02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen RTP (SPIP)	1 dokumen		-		1.000.000		-		1.050.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					Pengadaan N2 cair	5000 liter									
					Pengadaan plastik glove	8250 batang									
					Pengadaan plastik sheet	8250 lembar									
					Semen beku	4500 dosis									
					Uji performans sapi potong	10 kali									
7	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi hasil perkebunan dan hortikulra unggulan meningkat	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			0,62	26.165.000	1,49	62.725.000	97,12	4.081.680.000	0,77	32.195.000	
					kakao	520.000 Kg	104.000		119.600		119.600		176.800		
					Mete	634.600 Kg	-		-		222.110		412.490		
					Tembakau	541.950 Kg	-		-		460.657		81.293		
					Kelapa	25.158.062 butir	6.037.935		6.289.515		5.534.774		7.295.838		
					Bawang Merah	484,78 ton	19,00		218,00		179,00		67,00		
					Cabe	502,01 ton	75,30		140,56		200,80		85,34		
			2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian											
			01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Sosialisasi LP2B di tingkat kelompok	18 kelompok		13.940.000		13.420.000		920.000		720.000	
					sosialisasi peta LP2B dan pendataan /verifikasi peta LP2B	17 desa									
			2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											
			01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bimbingan teknis pengelolaan P3A	1 angkatan		12.225.000		49.305.000		4.080.760.000		31.475.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					Jumlah Pembangunan Sumur dalam pertanian (PF)	2 unit									
					Pembangunan dam parit (DAK)	2 unit									
					Pembangunan irigasi air tanah dangkal (DAK)	7 unit									
					Pembangunan irigasi air tanah sedang (DAK)	10 unit									
					Pembangunan Sumur dangkal pertanian (PF)	4 unit									
					Pengembangan sumber air (DBHCHT)	1 unit									
8	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			42,84	273.087.000	17,55	111.855.000	21,47	136.855.000	18,13	115.590.000	
					Sapi potong	152.526 Ekor	152.326		152.356		152.400		152.526		
					Kambing	197.557 Ekor	191.026		194.910		195.887		197.557		
					Ayam buras	1.196.808 Ekor	1.099.644		1.121.637		1.144.070		1.201.273		
					Daging	4.618.751 Kg	954.284		1.043.407		1.643.182		977.878		
					Telur	3.385.232 Kg	829.455		904.084		902.513		749.180		
			2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota											
			01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemantauan wilayah pasca vaksinasi antrax	20 padu kuhan		96.710.000		16.420.000		42.520.000		12.890.000	

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
					Pembangunan ruang informasi BPP (DAK)	18 unit									
					Pendampingan Kostra Tani (DAK Non Fisik)	18 BPP									
					Pendampingan teknologi pertanian	1 angkatan									
					Penyusunan media cetak informasi pertanian	2 jenis									
					Sarana Keinformasian BPP (DAK)	18 paket									
					Temu karya	1 kali									
					Temu Teknis	1 kali									
		TOTAL						7.638.324.982		17.122.875.036		10.479.830.412		5.058.139.122	

Wonosari,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



Ir. Bambang Wisnu Broto
NIP. 14610921 198903 1 007

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	2.09.03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			16,11	183.837.000	69,12	780.093.500	9,65	107.832.500	5,12	50.292.500	Bidang Ketahanan Pangan
							Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan	(dalam juta)									
							padi	20,77 Rp/ha							20,77		
							jagung	16,75 Rp/ha							16,75		
							kedelai	8,50 Rp/ha							8,50		
							kakao	28,08 Rp/ha							28,08		
							kelapa	36,76 Rp/ha							36,76		
							mete	23,15 Rp/ha							23,15		
							tembakau	76,58 Rp/ha							76,58		
							bawang merah	175,03 Rp/ha							175,03		
							cabe besar	67,14 Rp/ha							67,14		
							pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC)	34.667 Rp (ekor)	8.100		8.500		9.200		8.867		
							Hasil ternak /daging sapi, kambing ayam dan telur	270.683 Rp (kg)	43.937		39.783		140.838		46.125		
				2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											
					01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM tahun 2020	1 dokumen	0	2.277.000	0	797.500	0	997.500	1	927.500	
							Jumlah laporan informasi harga tingkat produsen dan konsumen	12 laporan	3		3		3		3		
							Pelaksanaan Analisis usaha tani	4 laporan	4								

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
					05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pelatihan dan pendampingan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)	1 angkatan	1	3.385.000		(1.065.000)		130.000		-	
				2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota											
					03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan beras cadangan pangan pemerintah	6 ton	0	-	0	60.000.000	0	-	60	-	
				2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
					01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Analisis Pola Konsumsi Pangan (PPH)	1 dokumen	0	-	0	-	0	1.000.000	1	1.000.000	
					02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bibit tanaman untuk pengembangan pangan perkotaan	1 paket	1	178.175.000	0	720.361.000	0	105.705.000	-	48.365.000	
							Bimbingan teknis pengolahan kakao	1 angkatan					1				
							Bimbingan teknis pengolahan mete	1 angkatan							1		
							Bimbingan teknis pengolahan mocaf	1 angkatan					1				
							Jumlah kelompok (wanita) tani yang mengikuti pelatihan pengolahan aneka keripik (PF)	22 kelompok	5		7		7		3		
							Jumlah kelompok tani yang dilatih pengolahan pasca panen hasil pertanian (PIWK)	14 kelompok	3		3		3		3		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah kelompok (wanita) tani yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL PIWK)	4 kelompok	0		4		0		-		
							Jumlah kelompok (wanita) tani yang mengikuti pelatihan pengolahan aneka keripik (PIWK)	4 kelompok	1		0		0		3		
							KRPL desa baru pasca covid	14 paket	0		14		0		-		
							KRPL desa lama pasca covid	10 paket	0		10		0		-		
							Pendampingan Pekarangan Pangan Lestari/P2L (DAK Non Fisik)	7 kelompok	0		7		0		-		
							Penyelenggaraan pasar tani	48 kali	12		12		12		12		
							Penyelenggaraan temu usaha/kemitraan	1 kali	0		1		0		-		
							Sosialisasi konsumsi pangan lokal karbohidrat non karbohidrat (komoditas minor)	3 kali	2		1		0		-		
3	Ketahanan Pangan Meningkat	Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meningkat	2.09.04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			56,13	2.245.000	11,13	445.000	25,88	1.035.000	7	275.000	Bidang Ketahanan Pangan
				2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	4 kali	1	2.245.000	1	445.000	1	1.035.000	1	275.000	
							Pelatihan desa mandiri pangan	4 kali	0		0		0		4		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Workshop sertifikasi dan pelabelan mutu produksi hasil pertanian	1 angkatan	0		1		0		-			
5	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		25,38	6.118.222.232	32,53	8.214.598.288	23,17	5.544.429.442	18,92	2.483.653.630		
		Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan perangkat daerah				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD	100 persen									Sub Bag Perencanaan
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100 persen									
		Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100 persen									
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen									
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 persen									

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	3.27.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD		5.920.000		1.360.000		2.380.000		7.790.000		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah draft Renstra 2021-2024	1 dokumen	0	3.780.000	1	1.060.000	0	-	-	3.110.000	
							Jumlah Forum PD yang terlaksana	1 kali	1		0		0		-		
							Jumlah renja dan renja perubahan	2 dokumen	0		1		0		1		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	0	-	1	-	0	200.000	-	300.000	
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP	1 dokumen	1	1.940.000	0	300.000	0	1.680.000	-	3.580.000	
							Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja PD	12 laporan	3		3		3		3		
							Jumlah laporan evaluasi RKPD	4 laporan	1		1		1		1		
		Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	2.09.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 dokumen	0	-	1	-	0	500.000	-	-	
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	1	200.000	0	-	0	-	-	300.000	
							Jumlah Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1		0		0		-		
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	0	-	0	-	0	-	1	500.000	
							Jumlah Perubahan Perianjian Kineria	1 dokumen	0		0		0		1		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat	2.09.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu		5.782.814.732		7.828.468.288		5.195.291.942		2.053.398.630	Sub Bag Keuangan	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3	5.770.633.732	4	7.816.838.288	4	5.182.526.942	3	2.041.933.630	
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1	2.450.000	0	500.000	0	500.000	-	500.000	
							jumlah dokumen LRA	1 dokumen	1		0		0		-		
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran dan dokumen LRA	14 laporan	3	9.731.000	4	11.130.000	3	12.265.000	4	10.965.000	
							Jumlah Laporan Prognosis (2 semester)	2 laporan	0		1		0		1		
		Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat	2.09.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas			1.000.000		800.000		600.000		1.020.000	Sub Bag Umum
					03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	171 ASN	70	1.000.000	30	800.000	30	600.000	41	1.020.000	
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			294.887.500		318.470.000		311.127.500		384.295.000	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	1 LS	1	3.490.000	0	-	0	2.910.000	-	-	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kantor dinas, UPT, BPP dan TTP)	1 LS	0	66.880.000	1	-	0	-	-	-	
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	1 LS	1	3.327.500	0	-	0	3.072.500	-	-	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetak blanko disposisi, bkp, amplop, map, sppd	1 LS	1	9.250.000	0	750.000	0	9.250.000	-	750.000	
							cetak blanko KUASI	1 LS	1		0		0		-		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar	12 bulan	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah konsultasi luar daerah	18 OH	1	10.935.000	2	7.380.000	2	2.550.000	13	5.230.000	
							jumlah minum snack rapat dan tamu	1000 OR	120		280		300		300		
				02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim dan jasa iklan	70 buah	20	50.000	15	650.000	15	650.000	20	150.000	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar (16rek x 12 bulan)	192 rekening	48	200.655.000	48	309.390.000	48	292.395.000	48	377.865.000	
							Jumlah rekening listrik yang dibayar (39 rek x 12 bulan)	468 rekening	117		117		117		117		
							Jumlah rekening telepon yang dibayar (6 rek x 12 bulan)	72 rekening	18		18		18		18		
							Jumlah tanah kas desa yang terbayar sewanya (BPP Panggang dan UPT Wonosari)	2 lokasi	0		1		0		1		
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur			33.600.000		65.500.000		35.030.000		37.150.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	197 unit	37	32.350.000	50	54.750.000	50	33.780.000	60	32.350.000	
							Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	9 unit	4		2		2		1		
							Jumlah kendaraan roda dua yang terpelihara (servis dan BBM)	1 LS	0,27		0,25		0,24		0		
							Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara (servis dan BBM)	1 LS	0,27		0,25		0,24		0		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi (printer, mesin fax, LCD Proyektor, dll	1 LS	0,25	1.250.000	0,25	1.250.000	0,25	1.250.000	0,25	1.250.000	
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terfasilitasi (AC, kipas angin, pompa air, LED monitor)	1 LS	0,25	-	0,25	8.500.000	0,25	-	0,25	2.500.000	
				2.13		Penataan Organisasi											
					02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen RTP (SPIP)	1 dokumen	0	-	1	1.000.000	0	-	0	1.050.000	
							Dokumen SKM OPD	2 dokumen	0		1		0		1		
							Dokumen SKM UPT Lab Keswan	2 dokumen	0		1		0		1		
							Dokumen SKM UPT Perbenihan	2 dokumen	0		1		0		1		
							Dokumen SKM UPT Puskesmas	12 dokumen	0		6		0		6		
							Dokumen SOP OPD	2 dokumen	0		1		0		1		
6	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi tanaman pangan meningkat	3.27.02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			10,66	122.356.250	85,66	4.354.001.000	2,65	113.640.750	1,03	87.571.250	Kabid Perkebunan dan Hortikultura
							Padi	291.962 ton	241.000		46.000		3.000		1.962		
							Jagung	209.500 ton	200.000		9.000		500		-		
							Kedelai	7.500 ton	100		4.000		3.100		300		
							Ubi Kayu	885.110 ton	-		-		885.110		-		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Tekhnologi dan Spesifik Lokasi	Bantuan cultivator (DBHCHT)	3 unit		1.550.000		51.659.750		-		-	
					02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Alat perajang tembakau (DBHCHT)	1 unit	0	54.526.250	0	4.228.731.250	1	57.140.750	-	8.981.250	
							Bimbingan teknis budidaya bawang merah	1 angkatan	1		0		0		-		
							Bimbingan teknis budidaya cabe	1 angkatan	0		0		0		1		
							Bimbingan teknis budidaya mete	1 angkatan	0		0		0		1		
							Bimbingan teknis penyusunan RDKK pupuk bersubsidi	9 angkatan	9		0		0		-		
							Intensifikasi jambu mete	5 ha	0		0		5		-		
							Intensifikasi kelapa	5 ha	0		0		5		-		
							Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan cultivator (PF)	77 unit	0		77		0		-		
							Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan traktor (PF)	146 unit	0		146		0		-		
							Pelatihan pengembangan budidaya jagung	1 angkatan	1		0		0		-		
							Pemeliharaan kebun induk kakao	1 ha	1		0		0		-		
							Pengadaan benih/bibit jagung	195 kg	0		0		195		-		
							Pengadaan benih/bibit padi	180 kg	0		0		180		-		
							Pengawasan pupuk dan pestisida	12 kali	3		3		3		3		
							Penyusunan data statistik perkebunan dan hortikultura	2 dokumen	0		0		0		2		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyusunan data statistik tanaman pangan : data LTT, data ubinan, laporan, penyusunan ARAM dan ATAP	1 dokumen	0		0		0		1		
				2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											
					01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Belanja sarana produksi pertanian	1 paket	0,5	39.960.000	0,2	18.720.000	0	49.800.000	0,3	22.070.000	
							Penangkaran benih padi	8 ha	1		6		0		1		
							Pengadaan benih padi (benih dasar)	250 kg	200		0		0		50		
							Pengadaan benih padi lulus sertifikasi	110000 kg	3000		0		8000		-		
				2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bimbingan teknis penanaman hijauan pakan ternak	2 angkatan	0	26.320.000	0	54.890.000	0	6.700.000	2	56.520.000	
							Bimbingan teknis pengelolaan pakan ternak alternatif	3 angkatan	0		3		0		-		
							Bimbingan teknis pengelolaan pupuk kandang	3 angkatan	0		3		0		-		
							Pelatihan petugas data peternakan	4 angkatan	1		1		1		1		
							pembinaan asosiasi pengolah pakan ternak	4 kali	1		1		1		1		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan asosiasi pengolah pupuk kandang	4 kali	1		1		1		1		
							Pembinaan gabungan kelompok perbibitan/ gapokbit ternak	4 kali	1		1		1		1		
							Pengadaan bibit hijauan pakan ternak (HPT)	2 paket	0		0		0		2		
							Pengadaan N2 cair	5000 liter	0		2285		0		2.415		
							Pengadaan plastik glove	8250 batang	8250		0		0		-		
							Pengadaan plastik sheet	8250 lembar	8250		0		0		-		
							Uji performans sapi potong	10 kali	1		1		1		7		
7	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	3.27.03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			0,62	51.775.000	1,49	3.408.205.000	97,12	3.412.040.000	0,77	28.963.000	Kabid Tanaman Pangan
							kakao	520.000 Kg	104.000		119.600		119.600		176.800		
							Mete	634.600 Kg	-		-		222.110		412.490		
							Tembakau	541.950 Kg	-		-		460.657		81.293		
							Kelapa	25.158.062 butir	6.037.935		6.289.515		5.534.774		#####		
							Bawang Merah	484,78 ton	19,00		218,00		179,00		67,00		
							Cabe	502,01 ton	75,30		140,56		200,80		85,34		
				2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian											
					01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Sosialisasi LP2B di tingkat kelompok	8 kelompok	8	7.650.000	0	-	0	-	-	-	
							sosialisasi peta LP2B dan pendataan /verifikasi peta LP2B	4 desa	4		0		0		-		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
					03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengembangan sumber air (DBHCHT)	1 unit	0	-	0	6.130.000	1	106.090.000	-	3.596.000	
				2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian											
					01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bimbingan teknis pengelolaan P3A	1 angkatan	0	12.225.000	0	708.945.000	0	3.050.995.000	1	22.867.000	
							Jumlah Pembangunan Sumur dalam pertanian (PF)	2 unit	0		0		0		2		
							Pembangunan irigasi air tanah dangkal (DAK)	7 unit	0		0		0		7		
							Pembangunan irigasi air tanah sedang (DAK)	10 unit	0		0		10		-		
							Pembangunan Sumur dangkal pertanian (PF)	4 unit	0		0		0		4		
							Pengembangan sumber air (DBHCHT)	1 unit	0		0		1		-		
					04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan dam parit (DAK)	2 unit	0	-	0	2.730.000	2	250.405.000	-	2.500.000	
					08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pembangunan ruang informasi BPP (DAK)	18 unit	0	31.900.000	18	2.690.400.000	0	4.550.000	-	-	
							Sarana Keinformasian BPP (DAK)	18 paket	0		18		0		-		
8	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat	3.27.04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			42,84	269.864.675	17,55	90.505.000	21,47	109.705.000	18,13	23.520.000	Kabid Peternakan
							Sapi potong	152.526 Ekor	152.326		152.356		152.400		152.526		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Kambing	197.557 Ekor	191.026		194.910		195.887		197.557			
						Ayam buras	1.196.808 Ekor	1.099.644		1.121.637		1.144.070		#####			
						Daging	4.618.751 Kg	954.284		1.043.407		1.643.182		977.878			
						Telur	3.385.232 Kg	829.455		904.084		902.513		749.180			
				2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemantauan wilayah pasca vaksinasi antrax	20 padu kuhan	10	91.374.850	0	16.420.000	10	37.810.000	-	1.155.000	
							Pengawasan obat hewan	1 dokumen	0		0		0		1		
							Sosialisasi PHMS Tingkat Kabupaten	2 angkatan	0		1		0		-		
				2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Evaluasi vaksinasi AI/ND/Rabies	100 sampel	25	14.245.000	25	34.575.000	25	7.720.000	25	5.415.000	
							Kalibrasi peralatan laboratorium	1 paket	0		0		1		-		
							Monitoring dan surveilans PHMS untuk brucellosis dan antrax	730 sampel	168		242		200		120		
							Monitoring dan surveilans PHMS untuk endoparasit pada ternak	100 sampel	25		25		25		25		
							Pengawasan kualitas pangan asal hewan	300 sampel	30		90		90		90		
					02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)- PIWK	14 angkatan	2	162.384.825	7	36.800.000	5	49.605.000	-	4.510.000	

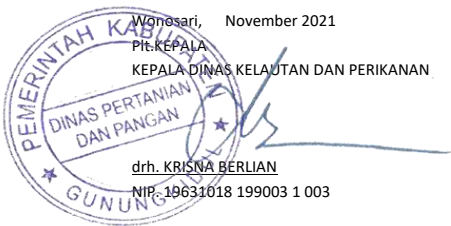
No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (6 angkatan X 3 kec. X 6 UPT)	108 kali	27	27		27		27		
							Pelayanan TPKH (Tempat Pelaksanaan Kesehatan Hewan) (55 ekor X 12 bulan x 6 UPT)	3960 ekor	990	990		990		990		
							pendataan dan penanganan PHMS (12 laporan bulaan x 6 UPT)	72 laporan	18	18		18		18		
							pengadaan obat ternak	1 paket	1	0		0		-		
							pengadaan peralatan medis nakai habis	1 paket	1	0		0		-		
							Sosialisasi apresiasi kurban	6 angkatan	0	0		1		5		
							Sosialisasi keswan kesmavet	6 angkatan	4	1		1		-		
				2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										
					03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai	2 kali	0	1.860.000	1	2.710.000	0	14.570.000	1	12.440.000
							Pemantauan pemotongan hewan kurban	1 kali	0	0		1		5		
							Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	1 dokumen	0	0		0		1		
							Pengawasan praktik pelayanan jasa medik veteriner	1 dokumen	0	0		0		1		
							Peningkatan kapasitas petugas medis peternakan	1 angkatan	1	0		0		-		
							Sosialisasi daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	2 angkatan	0	0		2		-		
							Sosialisasi RPH	6 kali	0	0		1		5		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											
					01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kec. dan Desa	Jumlah tenaga Fungsional yang dinilai	2 kali	0	55.425.000	1	59.030.000	1	69.625.000	-	47.055.000	
							Monitoring Sistem Kerja Latihan dan Kuniungan (LAKU)	18 kec.	0		9		0		9		
							Pelatihan kepenyuluhan BPP	72 angkatan	18		18		18		18		
							Pelatihan pemberdayaan KWT	4 angkatan	2		1		1		-		
							Pelatihan petani milenial	3 angkatan	2		1		0		-		
							Pendampingan penyuluh swadaya	2 angkatan	2		0		0		-		
							Penilaian lomba aparatur dan Non Aparatur	5 kategori	0		0		5		-		
					02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di kec. dan Desa	Fasilitasi pendampingan PUAP dan LKM	18 kec.		8.830.000		6.040.000		5.440.000		7.700.000	
							Jumlah kelompok yang dilatih P4S	1 angkatan	0		1		0		-		
							Pemberdayaan KWT	1 angkatan	1		0		0		-		
							Pembinaan Asosiasi Tembakau (DBHCHT), asosiasi pupuk, cabe, dan ASPIPO	4 asosiasi	1		0		0		-		
					03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Demplot	9 paket	9	69.430.000	0	80.520.000	0	59.735.000	-	45.905.000	
							Jumlah programa penyuluh tingkat desa, kec. dan kabupaten	163 dokumen	0		0		0		163		
							Kaji terap	4 unit	4		0		0		-		
							Pendampingan Kostra Tani (DAK Non Fisik)	18 BPP	5		5		4		4		
							Pendampingan teknologi pertanian	1 angkatan	0		0		0		1		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Penyusunan media cetak informasi pertanian	2 jenis		0		0		0		2		
							1 kali		1		0		0		-		
			TOTAL				Temu Teknis			7.127.285.157		17.772.437.788		9.523.267.692		2.791.410.380	

Wonosari, November 2021
 Pdt. KEPALA
 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

drh. KRISNA BERLIAN
 NIP. 19631018 199003 1 003



No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	2.09.03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			16,11	183.837.000	69,12	780.093.500	9,65	107.832.500	5,12	50.292.500	Bidang Ketahanan Pangan
							Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan	(dalam juta)									
							padi	20,77 Rp/ha							20,77		
							jagung	16,75 Rp/ha							16,75		
							kedelai	8,50 Rp/ha							8,50		
							kakao	28,08 Rp/ha							28,08		
							kelapa	36,76 Rp/ha							36,76		
							mete	23,15 Rp/ha							23,15		
							tembakau	76,58 Rp/ha							76,58		
							bawang merah	175,03 Rp/ha							175,03		
							cabe besar	67,14 Rp/ha							67,14		
							pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC)	34.667 Rp (ekor)	8.100		8.500		9.200		8.867		
							Hasil ternak /daging sapi, kambing ayam dan telur	270.683 Rp (kg)	43.937		39.783		140.838		46.125		
				2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											
					01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM tahun 2020	1 dokumen	0	2.277.000	0	797.500	0	997.500	1	927.500	
							Jumlah laporan informasi harga tingkat produsen dan konsumen	12 laporan	3		3		3		3		
							Pelaksanaan Analisis usaha tani	4 laporan	4								

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pelatihan dan pendampingan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)	1 angkatan	1	3.385.000		(1.065.000)		130.000			-	
				2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota												
					03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan beras cadangan pangan pemerintah	6 ton	0	-	0	60.000.000	0	-	60		-	
				2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi												
					01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Analisis Pola Konsumsi Pangan (PPH)	1 dokumen	0	-	0	-	0	1.000.000	1		1.000.000	
					02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bibit tanaman untuk pengembangan pangan perkotaan	1 paket	1	178.175.000	0	720.361.000	0	105.705.000	-		48.365.000	
							Bimbingan teknis pengolahan kakao	1 angkatan					1					
							Bimbingan teknis pengolahan mete	1 angkatan							1			
							Bimbingan teknis pengolahan mocaf	1 angkatan					1					
							Jumlah kelompok (wanita) tani yang mengikuti pelatihan pengolahan aneka keripik (PF)	22 kelompok	5		7		7		3			
							Jumlah kelompok tani yang dilatih pengolahan pasca panen hasil pertanian (PIWK)	14 kelompok	3		3		3		3			
							Jumlah kelompok (wanita) tani yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)-PIWK	4 kelompok	0		4		0		-			

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
					04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi keamanan pangan	1 kali	0	203.190.000	0	231.255.000	0	90.420.000	1	11.085.000	
							Jumlah Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan	60 kali	14		23		3		20		
							Pengujian bahan pangan segar	1 kali	1		0		0		-		
							Sosialisasi pangan aman	2 angkatan	0		0		0		2		
					05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis mutu hasil produksi tanaman hortikultura	1 angkatan	0	3.895.000	1	5.725.000	0	2.855.000	-	-	
							Bimbingan teknis mutu hasil produksi tanaman pangan	1 angkatan	1		0		0		-		
							Bimbingan teknis mutu hasil produksi tanaman perkebunan	1 angkatan	0		0		1		-		
							Bimbingan teknis PIRT	1 angkatan									
							Fasilitasi uji laboratorium Dinas Kesehatan (Pengajuan sertifikasi PIRT)	20 paket									
							Workshop sertifikasi dan pelabelan mutu produksi hasil pertanian	1 angkatan	0		1		0		-		
5	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25,38	6.118.222.232	32,53	8.214.598.288	23,17	5.544.429.442	18,92	2.483.653.630	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan perangkat daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD	100 persen									Sub Bag Perencanaan
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100 persen									
		Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100 persen									
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen									
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 persen									
		Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	3.27.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD		5.920.000		1.360.000		2.380.000		7.790.000	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah draft Renstra 2021-2024	1 dokumen	0	3.780.000	1	1.060.000	0	-	-	3.110.000
							Jumlah Forum PD yang terlaksana	1 kali	1		0		0		-	
							Jumlah renja dan renja perubahan	2 dokumen	0		1		0		1	
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	0	-	1	-	0	200.000	-	300.000
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIIIP	1 dokumen	1	1.940.000	0	300.000	0	1.680.000	-	3.580.000

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja PD	12 laporan	3		3		3		3		
							Jumlah laporan evaluasi RKPD	4 laporan	1		1		1		1		
		Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	2.09.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 dokumen	0	-	1	-	0	500.000	-	-	
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	1	200.000	0	-	0	-	-	300.000	
							Jumlah Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1		0		0		-		
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	0	-	0	-	0	-	1	500.000	
							Jumlah Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen	0		0		0		1		
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat	2.09.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu			5.782.814.732		7.828.468.288		5.195.291.942		2.053.398.630	Sub Bag Keuangan
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3	5.770.633.732	4	7.816.838.288	4	5.182.526.942	3	2.041.933.630	
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1	2.450.000	0	500.000	0	500.000	-	500.000	
							jumlah dokumen LRA	1 dokumen	1		0		0		-		
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran dan dokumen LRA	14 laporan	3	9.731.000	4	11.130.000	3	12.265.000	4	10.965.000	
							Jumlah Laporan Prognosis (2 semester)	2 laporan	0		1		0		1		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah	2.09.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas				1.000.000		800.000		600.000		1.020.000	Sub Bag Umum
					03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	171 ASN	70		1.000.000	30	800.000	30	600.000	41	1.020.000	
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				294.887.500		318.470.000		311.127.500		384.295.000	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	1 LS	1		3.490.000	0	-	0	2.910.000	-	-	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kantor dinas, UPT, BPP dan TTP)	1 LS	0		66.880.000	1	-	0	-	-	-	
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	1 LS	1		3.327.500	0	-	0	3.072.500	-	-	
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetak blanko disposisi, bkp, amplop, map, sppd	1 LS	1		9.250.000	0	750.000	0	9.250.000	-	750.000	
							cetak blanko KUASI	1 LS	1			0		0		-		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar	12 bulan	3		300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah konsultasi luar daerah	18 OH	1		10.935.000	2	7.380.000	2	2.550.000	13	5.230.000	
							jumlah minum snack rapat dan tamu	1000 OR	120			280		300		300		
				02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim dan jasa iklan	70 buah	20		50.000	15	650.000	15	650.000	20	150.000	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar (16rek x 12 bulan)	192 rekening	48		200.655.000	48	309.390.000	48	292.395.000	48	377.865.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah rekening listrik yang dibayar (39 rek x 12 bulan)	468 rekening	117		117		117		117		
							Jumlah rekening telepon yang dibayar (6 rek x 12 bulan)	72 rekening	18		18		18		18		
							Jumlah tanah kas desa yang terbayar sewanya (BPP Panggang dan UPT Wonosari)	2 lokasi	0		1		0		1		
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur			33.600.000		65.500.000		35.030.000		37.150.000	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	197 unit	37	32.350.000	50	54.750.000	50	33.780.000	60	32.350.000	
							Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	9 unit	4		2		2		1		
							Jumlah kendaraan roda dua yang terpelihara (servis dan BBM)	1 LS	0,27		0,25		0,24		0		
							Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara (servis dan BBM)	1 LS	0,27		0,25		0,24		0		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi (printer, mesin fax, LCD Proyektor, dll	1 LS	0,25	1.250.000	0,25	1.250.000	0,25	1.250.000	0,25	1.250.000	
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terfasilitasi (AC, kipas angin, pompa air, LED monitor)	1 LS	0,25	-	0,25	8.500.000	0,25	-	0,25	2.500.000	
				2.13		Penataan Organisasi											
					02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen RTP (SPIP)	1 dokumen	0	-	1	1.000.000	0	-	0	1.050.000	
							Dokumen SKM OPD	2 dokumen	0		1		0		1		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Dokumen SKM UPT Lab Keswan	2 dokumen	0		1		0			1		
						Dokumen SKM UPT Perbenihan	2 dokumen	0		1		0			1		
						Dokumen SKM UPT Puskesmas	12 dokumen	0		6		0			6		
						Dokumen SOP OPD	2 dokumen	0		1		0			1		
6	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi tanaman pangan meningkat	3.27.02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		10,66	122.356.250	85,66	4.354.001.000	2,65	113.640.750	1,03	87.571.250	Kabid Perkebunan dan Hortikultura	
						Padi	291.962 ton	241.000		46.000		3.000		1.962			
						Jagung	209.500 ton	200.000		9.000		500		-			
						Kedelai	7.500 ton	100		4.000		3.100		300			
						Ubi Kayu	885.110 ton	-		-		885.110		-			
				2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bantuan cultivator (DBHCHT)	3 unit		1.550.000		51.659.750		-		-	
					02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Alat perajang tembakau (DBHCHT)	1 unit	0	54.526.250	0	4.228.731.250	1	57.140.750	-	8.981.250	
						Bimbingan teknis budidaya bawang merah	1 angkatan	1		0		0		-			
						Bimbingan teknis budidaya cabe	1 angkatan	0		0		0		1			
						Bimbingan teknis budidaya mete	1 angkatan	0		0		0		1			
						Bimbingan teknis penyusunan RDKK pupuk bersubsidi	9 angkatan	9		0		0		-			
						Intensifikasi jambu mete	5 ha	0		0		5		-			
						Intensifikasi kelapa	5 ha	0		0		5		-			
						Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan cultivator (PF)	77 unit	0		77		0		-			
						Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan traktor (PF)	146 unit	0		146		0		-			
						Pelatihan pengembangan budidaya jagung	1 angkatan	1		0		0		-			
						Pemeliharaan kebun induk kakao	1 ha	1		0		0		-			

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengadaan benih/bibit jagung	195 kg	0		0		195		-		
							Pengadaan benih/bibit padi	180 kg	0		0		180		-		
							Pengawasan pupuk dan pestisida	12 kali	3		3		3		3		
							Penyusunan data statistik perkebunan dan hortikultura	2 dokumen	0		0		0		2		
							Penyusunan data statistik tanaman pangan : data LTT, data ubinan, laporan, penyusunan ARAM dan ATAP	1 dokumen	0		0		0		1		
				2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											
					01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Belanja sarana produksi pertanian	1 paket	0,5	39.960.000	0,2	18.720.000	0	49.800.000	0,3	22.070.000	
							Penangkaran benih padi	8 ha	1		6		0		1		
							Pengadaan benih padi (benih dasar)	250 kg	200		0		0		50		
							Pengadaan benih padi lulus sertifikasi	110000 kg	3000		0		8000		-		
				2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bimbingan teknis penanaman hijauan pakan ternak	2 angkatan	0	26.320.000	0	54.890.000	0	6.700.000	2	56.520.000	

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
					01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Sosialisasi LP2B di tingkat kelompok	8 kelompok	8	7.650.000	0	-	0	-	-	-
							sosialisasi peta LP2B dan pendataan /verifikasi peta LP2B	4 desa	4	0		0		-		
					03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengembangan sumber air (DBHCHT)	1 unit	0	-	0	6.130.000	1	106.090.000	-	3.596.000
				2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian										
					01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bimbingan teknis pengelolaan P3A	1 angkatan	0	12.225.000	0	708.945.000	0	3.050.995.000	1	22.867.000
							Jumlah Pembangunan Sumur dalam pertanian (PF)	2 unit	0		0		0		2	
							Pembangunan irigasi air tanah dangkal (DAK)	7 unit	0		0		0		7	
							Pembangunan irigasi air tanah sedang (DAK)	10 unit	0		0		10		-	
							Pembangunan Sumur dangkal pertanian (PF)	4 unit	0		0		0		4	
							Pengembangan sumber air (DBHCHT)	1 unit	0		0		1		-	
					04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan dam parit (DAK)	2 unit	0	-	0	2.730.000	2	250.405.000	-	2.500.000

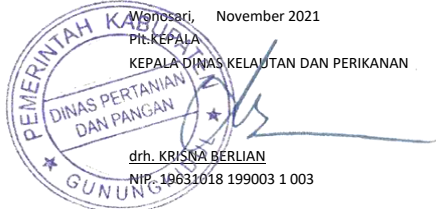
No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
					08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pembangunan ruang informasi BPP (DAK)	18 unit	0	31.900.000	18	2.690.400.000	0	4.550.000	-	-	
							Sarana Keinformasian BPP (DAK)	18 paket	0	18		0		-			
8	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat	3.27.04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			42,84	269.864.675	17,55	90.505.000	21,47	109.705.000	18,13	23.520.000	Kabid Peternakan
							Sapi potong	152.526 Ekor	152.326		152.356		152.400		152.526		
							Kambing	197.557 Ekor	191.026		194.910		195.887		197.557		
							Ayam buras	1.196.808 Ekor	1.099.644		1.121.637		1.144.070		1.201.273		
							Daging	4.618.751 Kg	954.284		1.043.407		1.643.182		977.878		
							Telur	3.385.232 Kg	829.455		904.084		902.513		749.180		
				2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemantauan wilayah pasca vaksinasi antrax	20 padu kuhan	10	91.374.850	0	16.420.000	10	37.810.000	-	1.155.000	
							Pengawasan obat hewan	1 dokumen	0		0		0		1		
							Sosialisasi PHMS Tingkat Kabupaten	2 angkatan	0		1		0		-		
				2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Evaluasi vaksinasi AI/ND/Rabies	100 sampel	25	14.245.000	25	34.575.000	25	7.720.000	25	5.415.000	
							Kalibrasi peralatan laboratorium	1 paket	0		0		1		-		
							Monitoring dan surveilans PHMS untuk brucellosis dan antrax	730 sampel	168		242		200		120		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring dan surveilans PHMS untuk endoparasit pada ternak	100 sampel	25		25		25		25		
							Pengawasan kualitas pangan asal hewan	300 sampel	30		90		90		90		
					02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)- PIWK	14 angkatan	2	162.384.825	7	36.800.000	5	49.605.000	-	4.510.000	
							Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (6 angkatan X 3 kec. X 6 UPT)	108 kali	27		27		27		27		
							Pelayanan TPKH (Tempat Pelaksanaan Kesehatan Hewan) (55 ekor X 12 bulan X 6 UPT)	3960 ekor	990		990		990		990		
							pendataan dan penanganan PHMS (12 laporan bulaan x 6 UPT)	72 laporan	18		18		18		18		
							pengadaan obat ternak	1 paket	1		0		0		-		
							pengadaan peralatan medis pakai habis	1 paket	1		0		0		-		
							Sosialisasi apresiasi kurban	6 angkatan	0		0		1		5		
							Sosialisasi keswan kesmavet	6 angkatan	4		1		1		-		
				2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner											
					03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai	2 kali	0	1.860.000	1	2.710.000	0	14.570.000	1	12.440.000	
							Pemantauan pemotongan hewan kurban	1 kali	0		0		1		5		
							Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	1 dokumen	0		0		0		1		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						Pengawasan praktik pelayanan jasa medik veteriner	1 dokumen	0		0		0		1		
						Peningkatan kapasitas petugas medis peternakan	1 angkatan	1		0		0		-		
						Sosialisasi daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	2 angkatan	0		0		2		-		
						Sosialisasi RPH	6 kali	0		0		1		5		
9	Ketahanan Pangan Meningkat	Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat	3.27.05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		44,38	18.395.000	21,06	1.555.000	17,13	5.040.000	17	5.040.000	Kabid Tanaman Pangan
				2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										
					01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan pengendalian OPT	8 kelompok	6	18.395.000	0	1.555.000	0	5.040.000	2	5.040.000
							Gerakan pengendalian OPT bawang merah	2 kelompok	0		0	0		2		
							Pelatihan agensi hayati	1 kelompok	1		0	0		-		
10	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kesejahteraan masyarakat petani meningkat	3.27.07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		5,10	133.685.000	83,97	145.590.000	5,07	134.800.000	5,86	100.660.000	Kabid Penyuluhan
						Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu	117 kelompok							177		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											
					01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kec. dan Desa	Jumlah tenaga Fungsional yang dinilai	2 kali	0	55.425.000	1	59.030.000	1	69.625.000	-	47.055.000	
							Monitoring Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU)	18 kec.	0		9		0		9		
							Pelatihan kepenyuluhan BPP	72 angkatan	18		18		18		18		
							Pelatihan pemberdayaan KWT	4 angkatan	2		1		1		-		
							Pelatihan petani milenial	3 angkatan	2		1		0		-		
							Pendampingan penyuluh swadaya	2 angkatan	2		0		0		-		
							Penilaian lomba aparatur dan Non Aparatur	5 kategori	0		0		5		-		
					02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di kec. dan Desa	Fasilitasi pendampingan PUAP dan LKM	18 kec.		8.830.000		6.040.000		5.440.000		7.700.000	
							Jumlah kelompok yang dilatih P4S	1 angkatan	0		1		0		-		
							Pemberdayaan KWT	1 angkatan	1		0		0		-		
							Pembinaan Asosiasi Tembakau (DBHCHT), asosiasi pupuk, cabe, dan ASPIPO	4 asosiasi	1		0		0		-		
					03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Demplot	9 paket	9	69.430.000	0	80.520.000	0	59.735.000	-	45.905.000	
							Jumlah programa penyuluh tingkat desa, kec. dan kabupaten	163 dokumen	0		0		0		163		
							Kaji terap	4 unit	4		0		0		-		
							Pendampingan Kostra Tani (DAK Non Fisik)	18 BPP	5		5		4		4		
							Pendampingan teknologi pertanian	1 angkatan	0		0		0		1		

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Penyusunan media cetak informasi pertanian	2 jenis		0		0		0		2		
						Temu Teknis	1 kali		1		0		0		-		
			TOTAL							7.127.285.157		17.772.437.788		9.523.267.692		2.791.410.380	

Wonosari, November 2021
 Pdt. KEPALA
 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 drh. KRISNA BERLIAN
 NIP. 19631018 199003 1 003